

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TRIWULAN III
TAHUN 2016





REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TRIWULAN III TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan pencapaian output kegiatan, dan realisasi penyerapan anggaran selama satu triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mengenai identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau *Project Completion Report* (PCR). Sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri lainnya, beberapa contoh pembelajaran (*lesson learned*) juga disampaikan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan terhadap target TA 2016 pada triwulan III mencapai 46,6 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 37,2 persen. Pada triwulan ini, tercatat sebanyak 54 proyek memiliki kinerja dengan penyerapan cukup baik, yaitu mampu menyerap diatas 52,5 persen dari target penarikan pinjaman. Namun masih terdapat beberapa proyek dengan kinerja yang rendah, bahkan belum menunjukkan perubahan yang signifikan atau belum ada perkembangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih menghambat pelaksanaan proyek pada triwulan ini antara lain permasalahan pembebasan lahan dan pengadaan barang/jasa.

Dalam laporan Triwulan III Tahun 2016 ini, terdapat beberapa pembelajaran (*lesson learned*) atas pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang masih berjalan maupun yang sudah selesai, misalnya pada proyek Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP II) pada Kementerian PUPR yang menunjukkan keberhasilan pada ketepatan pemilihan teknologi konstruksi untuk lokasi proyek di area padat lalu lintas, yaitu dengan menerapkan *clean construction* dan sistem *trench-less* menggunakan *jacking pipe*. Proyek DSDP II ini juga memberikan pembelajaran tentang pentingnya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan infrastruktur sanitasi. Selain itu, pada proyek *Infrastructure Development of Space Oceanography* (INDESO) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, didapatkan pembelajaran mengenai perlunya perbaikan struktur kelembagaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data, disamping pengembangan perangkat lunak pengolah citra digital, dan penggunaan jalur komunikasi satelit komando untuk menjaga kerahasiaan data.

Untuk dapat memastikan manfaat proyek, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan upaya perbaikan terhadap pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri secara terus menerus, baik dari sisi perencanaan, persiapan pelaksanaan proyek, maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Di samping itu, pembelajaran dan pengalaman (*lesson learned*) yang didapatkan selama siklus hidup proyek diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan selanjutnya, dan cara terbaik (*best practice*) yang didapatkan dapat disesuaikan serta diperluas atau direplikasi dengan sumber pendanaan lainnya sehingga berdampak lebih besar bagi masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'B' at the beginning.

DAFTAR ISTILAH

ADB	: Asian Development Bank
AFD	: Agence Francaise de Development
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Batam	: Badan Pengusahaan Batam
BPS	: Badan Pusat Statistik
EU	: European Union
IDB	: Islamic Development Bank
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
JICA	: Japan International Cooperation Agency
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemen KP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemennaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemen PPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
KSA	: Kreditor Swasta Asing
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPKE	: Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
SLA	: Subsidiary Loan Agreement; perjanjian penerusan pinjaman kepada BUMN/BUMD /Pemerintah Daerah
PT. PII	: PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PT. SMI	: PT. Sarana Multi Infrastruktur

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri disusun berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan tersebut mencakup perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri (tidak termasuk pinjaman program) dan kegiatan hibah yang direncanakan serta hibah langsung. Kurun waktu pemantauan proyek dilakukan mulai dari proyek efektif (*effective date*) sampai dengan proyek selesai (*closing date*).

GAMBARAN UMUM

Nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (*on going*) pada akhir Triwulan III Tahun 2016 (posisi 30 September 2016) adalah sebesar ekuivalen USD 16.794,6 juta, yang terdiri dari 163 proyek dan dilaksanakan oleh 18 Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Nilai pinjaman ini mengalami kenaikan sebesar USD 1.438,7 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan karena adanya beberapa proyek yang baru efektif, sedangkan beberapa proyek yang sudah ditandatangi namun belum efektif, tidak termasuk dalam proyek yang sedang berjalan (*on going*) yang dipantau dan dicantumkan dalam laporan ini.

Realisasi penyerapan kumulatif sampai dengan Triwulan III Tahun 2016 adalah sebesar USD 8.461,3 juta atau mencapai 50,4 persen dari total nilai pinjaman yang sedang berjalan. Sedangkan realisasi penyerapan sampai dengan triwulan III adalah USD 1.353,1 juta atau mencapai 46,6 persen dari target TA 2016 sebesar USD 2.902,1 juta. Persentase penyerapan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penyerapan lima tahun terakhir, yaitu 43,4 persen. Kemajuan kinerja penyerapan proyek selama satu triwulan ini berjalan dengan cukup baik, yang diindikasikan dengan adanya beberapa proyek yang mampu menyerap anggaran lebih dari 52,5 persen.

Dengan rata-rata penyerapan 46,6 persen tersebut, dari 163 proyek terdapat sekitar 54 proyek yang mampu mencapai realisasi penyerapan diatas 52,5 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa proyek yang sangat rendah penyerapannya atau bahkan belum mengalami penyerapan (penyerapan nol).

Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya kinerja proyek, diantaranya adalah kurang matangnya desain proyek (*Detail Engineering Design/DED*), lambatnya proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan pembebasan lahan. Permasalahan pembebasan lahan tidak hanya disebabkan oleh sulitnya perijinan dan negosiasi ganti rugi warga terdampak, tetapi juga disebabkan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Pembelajaran (*lesson learned*) dari pelaksanaan proyek yang sudah selesai maupun proyek yang masih berjalan, dan kinerja pelaksanaan hibah luar negeri khususnya hibah yang direncanakan juga disampaikan dalam laporan ini.

PINJAMAN LUAR NEGERI

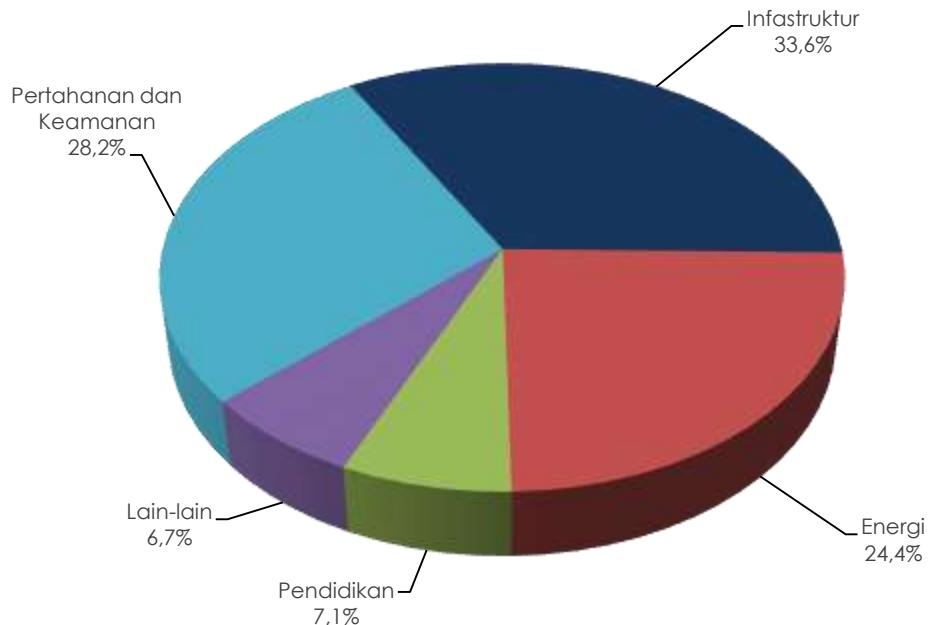
1. PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2016

Pinjaman luar negeri dapat dilihat profilnya berdasarkan pengelompokan dalam sektor pembangunan, berdasarkan instansi penanggung jawab, dan berdasarkan pemberi pinjaman (*lender*). Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui komposisi pinjaman, nilai pinjaman, dan realisasi penyerapan pada Triwulan III Tahun 2016, serta perubahannya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun 2015.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN ALOKASI SEKTORAL

Bila dikelompokkan berdasarkan sektor pembangunan, pinjaman luar negeri terbagi kedalam 5 (lima) sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Sektor lain-lain mencakup kesehatan, peningkatan teknologi (IT), pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Komposisi dan alokasi nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2016 berdasarkan sektor dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Pinjaman luar negeri sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur dan energi, yaitu sekitar 58,0 persen. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur diantaranya untuk pengembangan sarana transportasi dan perkeretaapian dalam rangka mendukung koneksi nasional, serta untuk mencapai target air bersih dan sanitasi. Sedangkan pinjaman luar negeri di sektor energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan mendukung pencapaian target listrik 35.000 MW di tahun 2019, yaitu berupa pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi. Sektor pertahanan dan keamanan menempati alokasi terbesar selanjutnya. Alokasi di sektor tersebut digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan alamsus Polri.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Triwulan III Tahun 2015), komposisi pinjaman berdasarkan sektor tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali adanya sedikit kenaikan pada sektor energi dari 21,6% menjadi 24,4%, serta penurunan pada sektor pendidikan dari 8,1% menjadi 7,1%, dan sektor lain-lain dari 8,2% menjadi 6,7%. Perubahan komposisi pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang baru efektif dan adanya proyek-proyek yang sudah selesai (*closed*).

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor

(Ekuivalen Juta USD)

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Infrastruktur	45	5.642,2	3.084,8	54,7	2.557,4	938,4	338,5	36,1
Energi	19	4.094,4	779,1	19,0	3.315,4	579,4	237,1	40,9
Pendidikan	15	1.190,4	438,8	36,9	751,5	239,7	104,9	43,7
Lain-lain	14	1.133,1	597,4	52,7	535,8	291,5	107,9	37,0
Pertahanan dan Keamanan	70	4.734,4	3.561,2	75,2	1.173,2	853,0	564,7	66,2
Total	163	16.794,6	8.461,3	50,4	8.333,3	2.902,1	1.353,1	46,6

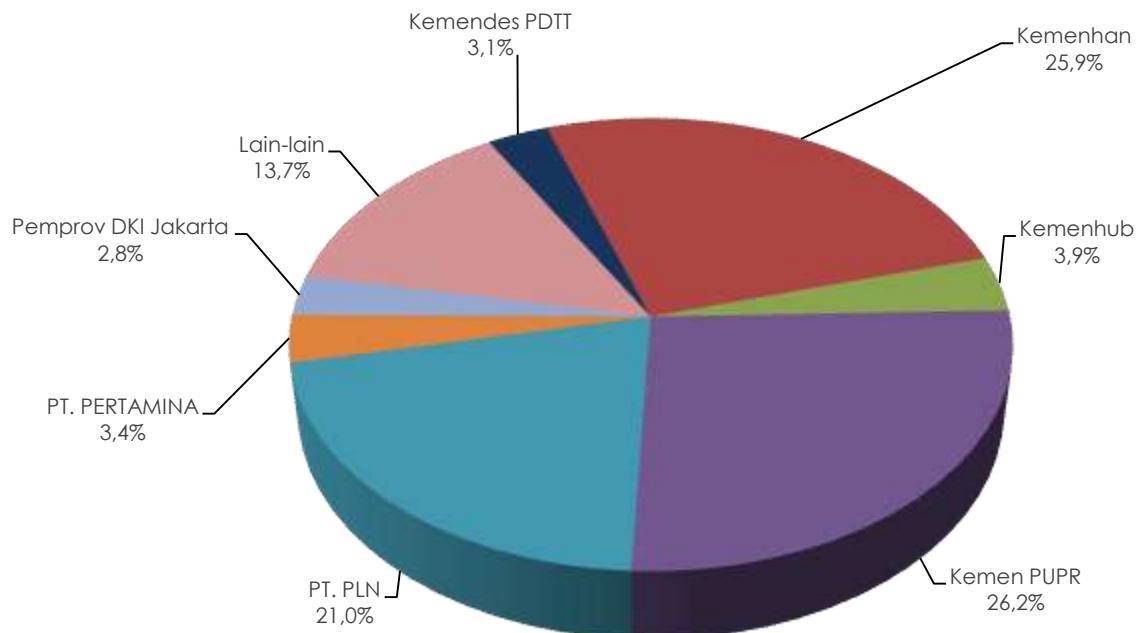
Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Secara umum realisasi penyerapan pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2015, yaitu meningkat dari 37,2 persen menjadi 46,6 persen. Berdasarkan data di tabel 2.1, sektor pertahanan dan keamanan memiliki kinerja penyerapan yang cukup tinggi, yaitu mampu menyerap 66,2 persen dari target penyerapan di tahun 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 45,7 persen. Disamping itu, kinerja di sektor energi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 5,7 persen pada Triwulan III Tahun 2015, menjadi 40,9 persen pada triwulan ini. Sektor pendidikan dan lain-lain juga memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun lalu. Sebaliknya, kinerja penyerapan di sektor infrastruktur masih rendah, bahkan lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 38,4 persen, sedangkan di triwulan ini hanya mampu mencapai 36,1 persen.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Komposisi pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggungjawab dapat dilihat dalam gambar 2.2. Proporsi terbesar berada di Kemenhan, Kementerian PUPR dan PT PLN. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan komposisi pinjaman selama triwulan ini, yaitu naiknya komposisi pinjaman pada Kementerian PUPR dari 25,0 persen pada Triwulan II Tahun 2016 menjadi 26,2 persen di Triwulan III Tahun 2016. Sedangkan komposisi pinjaman pada Kemenhan mengalami penurunan dari 26,3 persen menjadi 25,9 persen pada periode yang sama. Adapun instansi lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti dari sisi komposisi nilai pinjaman. Dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun lalu, komposisi pinjaman pada masing-masing instansi penanggung jawab relatif masih sama, dimana nilai pinjaman terbesar berada pada Kemenhan, Kementerian PUPR, dan PT. PLN.

Gambar 2.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Apabila dilihat dari nilai pinjaman, maka berdasarkan Tabel 2.2, terdapat peningkatan nilai pinjaman yang cukup besar dari Triwulan III Tahun 2015 ke Triwulan III Tahun 2016, yaitu naik sebesar USD 1.438,7 juta. Perubahan nilai pinjaman yang cukup signifikan terjadi pada PT. PLN yang naik sebesar USD 733,5 juta, Kemenhan naik sebesar USD 266,4 juta, dan Kepolisian RI yang juga naik sebesar USD 90,7 juta. Sedangkan Bappenas mengalami penurunan sebesar USD 97,7 juta, dan Kemenag mengalami penurunan sebesar USD 30,4 juta. Perubahan nilai pinjaman tersebut disebabkan adanya proyek-proyek yang telah selesai (*closing*) atau dibatalkan, dan adanya proyek-proyek yang baru efektif.

Tabel 2.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

(Ekuivalen Juta USD)

Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
			Nilai	%		Target	Realisasi	%
Kementerian/ Lembaga	141	12.118,6	7.211,3	59,5	4.907,4	2.098,7	1.040,0	49,6
BIG	1	63,1	61,9	98,1	1,2	0,0	0,0	0,0
BPKP	1	57,8	30,4	52,6	27,4	19,5	10,2	52,4
BP Batam	1	48,3	2,5	5,2	45,8	12,8	0,0	0,0
BPS	1	47,0	6,1	12,9	40,9	12,1	4,1	33,8
Kemenag	2	128,4	3,1	2,4	125,3	13,7	2,9	21,5
Kemendes PDTT	2	518,1	282,1	54,4	236,0	129,9	38,9	30,0
Kemen KP	3	166,9	83,2	49,9	83,7	26,9	6,8	25,4
Kemennaker	1	32,5	0,3	1,0	32,2	27,5	0,3	1,1
Kemenkominfo	1	53,8	44,8	83,3	9,0	22,7	21,6	95,1
Kemen PUPR	37	4.402,6	2.445,8	55,6	1.956,8	594,2	236,3	39,8
Kemdikbud	1	21,3	18,8	88,0	2,6	2,1	2,2	106,5
Kemenhub	5	658,1	168,1	25,5	490,0	120,3	26,2	21,8
Kementan	2	129,1	74,7	57,8	54,5	34,6	25,5	73,7
Kemen PPN/Bappenas	2	182,7	106,0	58,0	76,7	33,2	27,2	81,7
Kemenristekdikti	10	858,0	311,0	36,2	547,0	190,8	72,6	38,0
Kepolisian RI	23	389,2	209,4	53,8	179,8	247,4	56,4	22,8
Kemenhan	47	4.345,2	3.351,8	77,1	993,4	605,6	508,3	83,9
LIPI	1	16,5	11,4	69,0	5,1	5,6	0,5	8,6
Diteruspinjamkan (SLA)	21	4.199,0	880,8	21,0	3.318,3	580,6	237,3	40,9
PT. PII	1	4,6	1,9	41,3	2,7	1,2	0,2	16,7
PT. PERTAMINA	2	567,1	202,7	35,7	364,4	209,1	127,9	61,2
PT. PLN	17	3.527,3	576,3	16,3	2.951,0	370,3	109,2	29,5
PT. SMI	1	100,0	99,8	99,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Diterushibahkan	1	476,9	369,2	77,4	107,7	222,8	75,8	34,0
Pemprov DKI Jakarta	1	476,9	369,2	77,4	107,7	222,8	75,8	34,0
Total	163	16.794,6	8.461,3	50,4	8.333,3	2.902,1	1.353,1	46,6

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan instansi penanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan (Subsidiary Loan Agreement atau SLA), dan diterushibahkan. Dibandingkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu (Triwulan III Tahun 2015), hampir seluruh instansi penanggung jawab proyek mengalami peningkatan kinerja penyerapan pada triwulan ini, diantaranya Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenhan, Bappenas, Kementan, dan PT. Pertamina. Beberapa instansi tersebut dikategorikan menjadi instansi dengan kinerja penyerapan yang sangat baik karena telah melakukan penyerapan di atas 52,5 persen pada Triwulan III Tahun 2016. Selain terjadi peningkatan realisasi penyerapan, dalam Triwulan III Tahun 2016 juga terdapat beberapa instansi penanggungjawab yang memiliki tingkat penyerapan rendah, bahkan terdapat instansi yang belum melakukan penyerapan sama sekali (*nol*), yaitu BP Batam. Khusus untuk BIG dengan proyek National Geo-Spatial Data Infrastructure Development dan PT. SMI dengan proyek Indonesia Infrastructure Finance Facility, tidak

adanya penyerapan yang dilakukan di triwulan ini karena proyek sebenarnya sudah selesai dan menunggu *closing date*.

❖ PROFIL PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN

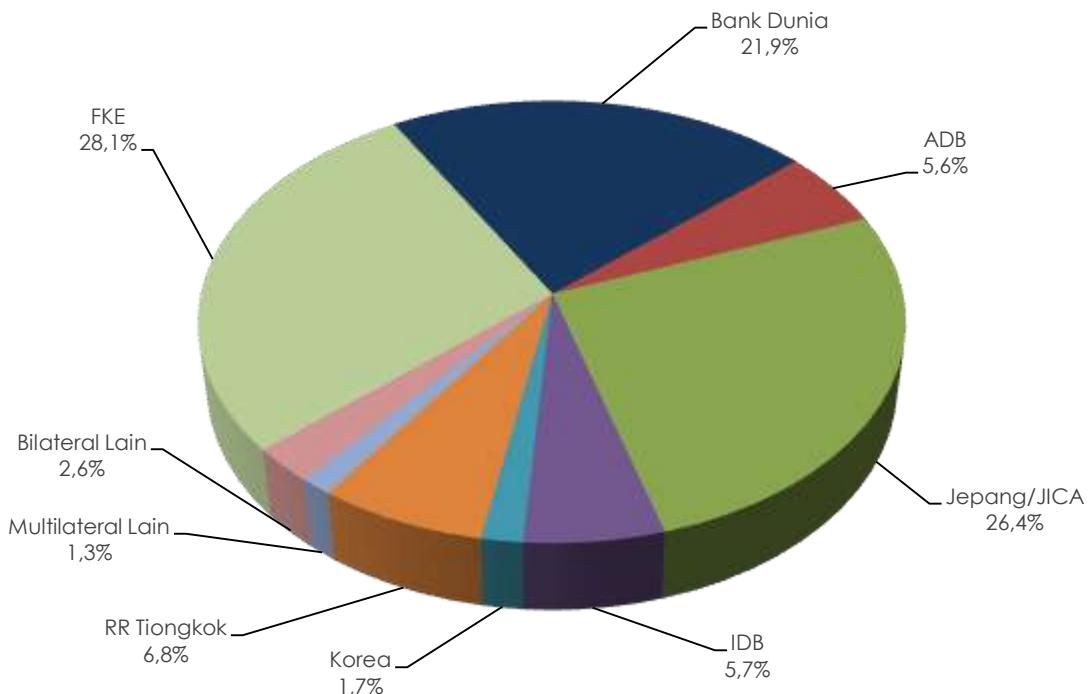
Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 (tiga) kelompok sumber pinjaman, yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE).

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Saudi Fund.

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti Jepang, Australia, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol.

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, Exim Bank of Korea, Export-Import Bank of China, dan Fortis Bank Belanda.

Gambar 2.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Keterangan: - Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD dan Saudi Fund
- Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman Jerman, Perancis, dan Spanyol

Sekitar 75 persen lebih dari pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going) berasal dari LPKE, Jepang dan Bank Dunia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3, Sedangkan sepertiganya terbagi ke dalam beberapa kreditor bilateral dan kreditor multilateral. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Triwulan III Tahun 2015), terdapat perubahan yaitu menurunnya komposisi pinjaman Bank Dunia dari 22,4 persen pada Triwulan III Tahun 2015 menjadi 21,9 persen pada Triwulan III Tahun 2016. Sebaliknya, pada rentang periode yang sama, terjadi kenaikan proporsi pinjaman Jepang dari 24,9 persen menjadi 26,4 persen, dan pinjaman RR Tiongkok dari 3,5 persen menjadi 6,8 persen. Untuk komposisi pada pemberi pinjaman lain tidak mengalami banyak perubahan, kecuali untuk proporsi pinjaman ADB yang turun dari 6,6 persen menjadi 5,6 persen, dan proporsi pinjaman bilateral lain yang turun cukup signifikan dari 4,5 persen menjadi 2,6 persen.

Dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2016, pada triwulan ini nilai pinjaman mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dilihat dari Tabel 2.3 secara total jumlah pinjaman senilai USD 16.794,6 juta mengalami kenaikan sebesar USD 495,3 juta dari triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya proyek yang baru efektif dari porsi pinjaman Bank Dunia dan LPKE, serta adanya perbedaan nilai kurs yang digunakan.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman

No	Sumber Pinjaman	Jumlah Loan	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	(Ekuivalen Juta USD)		
						Target	Realisasi	%
I	Kreditor Multilateral	56	5.788,5	2.038,1	3.750,4	1.090,6	472,3	43,3
	Bank Dunia	18	3.672,2	1.349,6	2.322,6	685,6	290,5	42,4
	ADB	13	937,1	261,5	675,6	171,3	80,3	46,8
	IDB	20	957,1	280,4	676,7	204,6	78,8	38,5
	IFAD	3	151,2	124,0	27,2	20,9	16,4	78,7
	Saudi Fund	2	71,0	22,7	48,3	8,1	6,4	79,2
II	Kreditor Bilateral	54	6.289,2	2.861,8	3.427,4	974,3	315,2	32,4
	Jepang	33	4.428,0	2.283,3	2.144,7	736,0	203,0	27,6
	Jerman	3	141,9	44,0	97,8	4,8	2,4	50,8
	Korea	5	282,2	45,7	236,5	73,3	10,6	14,5
	Perancis	5	274,8	108,1	166,7	38,6	26,7	69,2
	RR Tiongkok	7	1.145,9	369,3	776,6	116,0	72,0	62,0
	Spaniol	1	16,5	11,4	5,1	5,6	0,5	8,6
III	KSA/LPKE	64	4.716,8	3.561,4	1.155,5	837,2	565,6	67,6
	TOTAL	174	16.794,6	8.461,3	8.333,3	2.902,1	1.353,1	46,6

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Realisasi penyerapan pada Triwulan III Tahun 2016 yang mencapai 46,6 persen tersebut sebagian besar disumbang oleh kinerja proyek LPKE/KSA sebesar 67,6 persen, Kreditor Multilateral sebesar 43,3 persen dan Kreditor Bilateral sebesar 32,4 persen. Pada triwulan ini, kinerja tertinggi untuk Kreditor Multilateral dicapai oleh proyek-proyek pinjaman Saudi Fund dan IFAD, yang masing-masing mencapai 79,2 persen dan 78,7 persen. Sedangkan pada Kreditor Bilateral, kinerja tertinggi terjadi pada proyek-proyek pinjaman Perancis dan RR Tiongkok, yaitu mencapai 69,2 persen dan 62,0 persen. Namun demikian, masih terdapat sumber pinjaman dengan kinerja proyek yang masih rendah sebesar 8,6 persen, yaitu pada proyek pinjaman Spaniol. *Animal Husbandry Technology and Practises Improvement to Accelerate Meat and Milk Production* yang dibiayai pinjaman Spaniol mengalami keterlambatan pengiriman barang dan instalasi yang akan berakibat pada kesulitan pembayaran karena L/C berakhir masa lakunya dan tidak dapat diperpanjang.

❖ REKAPITULASI PROYEK TUTUP DAN BARU DI TRIWULAN III TAHUN 2016

Pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dapat dilihat beberapa proyek yang baru efektif dan masuk pemantauan, serta proyek yang telah selesai (*closed*) dalam satu triwulan ini sehingga dikeluarkan dari pemantauan pada Triwulan III 2016.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Proyek Baru Efektif di Triwulan III Tahun 2016

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	(Ekuivalen Juta USD)
				Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Baru Efektif				
1	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS III)	Kemen PUPR	Bank Dunia	300,0
2	3 Kegiatan	Kemenhan		52,5
3	4 Kegiatan	Polri		55,2
TOTAL				407,7

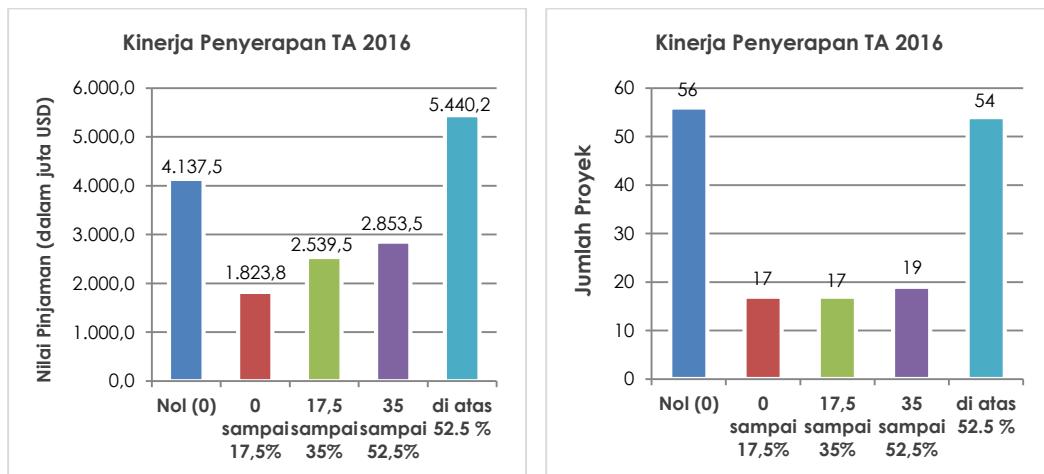
Tabel 2.5 Rekapitulasi Proyek Tutup di Triwulan III Tahun 2016

No	Nama/Jumlah Proyek	Instansi Penanggung Jawab	Lender	(Ekuivalen Juta USD)
				Nilai Pinjaman
Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Berakhir Masa Berlakunya				
1	Integrated Water Resources & Flood Management	Kemen PUPR	JICA	161,5
2	Decentralized Irrigation System Improvement Project	Kemen PUPR	JICA	88,8
3	Denpasar Sewerage Development Project II	Kemen PUPR	JICA	59,5
4	3 Kegiatan	Kemenhan		31,9
TOTAL				341,7

2. RINGKASAN KINERJA DAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI TRIWULAN III TAHUN 2016

Berdasarkan target penyerapan tahun 2016, maka realisasi anggaran sampai dengan triwulan ini mencapai 46,6 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, persentase realisasi penyerapan dalam triwulan ini mengalami kenaikan sebesar 9,4 persen. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh adanya kenaikan yang signifikan untuk realisasi penyerapan pada proyek-proyek Kreditor Multilateral dan Kreditor Bilateral, sedangkan untuk proyek-proyek dari Kreditor LPKE/KSA relatif hampir sama. Capaian kinerja setiap proyek sangat beragam, dimana terdapat proyek yang memiliki kinerja penyerapan cukup baik, bahkan mencapai diatas 52,5 persen dari target penyerapan, sebaliknya terdapat beberapa proyek yang belum mengalami penyerapan atau tidak memiliki pergerakan dari mulai efektif sampai dengan Triwulan III Tahun 2016.

Gambar 2.4 Kinerja Penyerapan TA 2016 Berdasarkan Nilai Pinjaman dan Jumlah Proyek



Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan III Tahun 2016 (diolah)

Bila dilihat dari kinerja penyerapan, secara umum terdapat sekitar 54 proyek yang memiliki kinerja penyerapan baik yang mampu menyerap di atas 52,5 persen dari target penyerapan TA 2016. Dilihat dari sisi nilai pinjaman, 52 proyek tersebut bernilai USD 5.440,2 juta atau 32,4 persen dari total nilai pinjaman sebesar USD 16.794,6 juta. Sekitar 90 proyek mengalami kinerja yang sangat lambat dan hanya mampu menyerap di bawah 35 persen dari target TA 2016. Diantara proyek-proyek tersebut, terdapat proyek yang mengalami penyerapan nol (0) atau bahkan belum menunjukkan adanya penyerapan proyek sejak dinyatakan efektif. Perhatian khusus perlu dilakukan pada proyek-proyek yang belum melakukan penyerapan sejak efektif karena nilainya mencapai USD 4.137,5 juta atau 24,6 persen dari total nilai pinjaman. Untuk meningkatkan kinerja proyek-proyek yang tergolong rendah penyerapannya tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan permasalahan proyek, dan mempercepat proses reviu terhadap perubahan atau revisi rencana pelaksanaan proyek.

Beberapa permasalahan masih terjadi dalam pelaksanaan proyek dalam triwulan ini. Permasalahan tersebut terutama terkait dengan revisi desain (DED) proyek, yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan proyek karena adanya perubahan-perubahan pada ruang lingkup, nilai, dan lokasi proyek. Permasalahan lainnya adalah lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang antara lain disebabkan oleh lamanya reviu dokumen lelang, lamanya penerbitan NOL, dan tidak adanya penawaran yang masuk (gagal lelang). Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait pengadaan lahan baik yang disebabkan karena proses perijinan, maupun terkait dengan isu permukiman kembali, dan kurangnya anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah administrasi seperti kekurangan alokasi DIPA, keterlambatan penerbitan Withdrawal Application (WA) dan pengesahan (Surat Perintah Pengesahan Pembukuan/SP3) juga masih sering terjadi.

3. LESSON LEARNED PELAKSANAAN PROYEK

Dalam laporan ini, terdapat 2 (dua) contoh proyek yang bisa dijadikan pembelajaran. Proyek tersebut adalah proyek yang telah selesai yaitu, Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP II) yang dikelola oleh Kementerian PUPR, dan proyek yang sedang berjalan yaitu Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP II)

Proyek Denpasar Sewerage Development Project (DSDP II) yang dibiayai JICA (Jepang) mulai efektif pada 25 Juli 2008 dan berakhir pada 25 Juli 2016 dengan nilai pinjaman JPY 6.004 juta. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan area pelayanan (815 hektar) sistem pengelolaan air limbah terpusat (sewerage system) di Denpasar, Kuta, dan Sanur dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan perairan (pantai, sungai dan air tanah).

Ruang lingkup pekerjaan proyek DSDP II meliputi konstruksi jaringan pipa utama dan sekunder/tersier, pengadaan dan instalasi peralatan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), inflow pump, aerator, generator, flow-meter dan water supply system, serta equipment terkait lainnya seperti mainhole dan wet pit. Pelaksanaan pekerjaan DSDP II dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu porsi Pemerintah Pusat adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), jaringan pipa utama hingga tersier, dan public campaign. Sedangkan porsi Pemerintah Daerah adalah Sambungan Rumah (SR) dan pengelolaan UPT.

Gambar 2.5 IPAL Suwung, Kolam Aerasi dan Kolam Sedimen



Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari proyek Denpasar Sewerage Development Project II (DSDP II) adalah sebagai berikut:

1. Implementasi “Clean Construction” secara konsisten, yaitu menerapkan sistem penggalian tanah dengan cara setiap galian tanah tidak ditempatkan di sisi galian, melainkan dibawa ke tempat penampungan sementara (stock yard) untuk dipilah sebagai bahan penimbunan kembali. Selanjutnya lokasi kerja sekitar galian tetap ditata dengan baik termasuk pemasangan papan barikade dan rambu-rambu pengaman kerja. Sehingga masyarakat dapat merasakannya sebagai tindakan kepedulian dari pihak pelaksana proyek terhadap kenyamanan masyarakat.

Gambar 2.6 Pelaksanaan Prinsip “Clean Construction”



2. Penerapan sistem “Trench-less” dengan menggunakan teknologi “Jacking Pipe” sangat efektif untuk area padat lalu lintas dan pusat pelayanan wisata seperti area Legian dan Kuta, sehingga dapat meminimalkan gangguan terhadap aktifitas pariwisata. Sistem ini memang sangat direkomendasikan untuk pekerjaan pemasangan pipa di daerah padat lalu lintas, padat utilitas bawah tanah, area pusat bisnis dan kedalaman pipa diatas empat meter.

Gambar 2.7 Pelaksanaan Metode “Pipe Jacking”



3. Pengaturan lalu lintas (*traffic management*) selama masa pelaksanaan proyek juga dilakukan melalui koordinasi yang sangat baik dengan semua instansi terkait, pengumuman jadwal konstruksi melalui media massa, penempatan rambu-rambu pengatur lalu lintas dan penempatan “Signal Man” (tenaga pengatur lalu lintas yang dilatih dari pemuda setempat). Hal tersebut dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ketidaknyamanan masyarakat.

Gambar 2.8 Pelaksanaan “Traffic Management”



4. Penyelenggaraan “Sosialisasi Berjenjang”, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, banjar/RT-RW, bahkan sosialisasi juga dilakukan “Door to Door” dengan melibatkan putra/putri atau aparat banjar/RT-RW setempat. Sosialisasi secara “Door to Door” dirasakan sangat efektif dalam menjalin pemahaman dari masyarakat, baik selama masa pelaksanaan konstruksi maupun untuk meningkatkan “minat menjadi pelanggan” (*willingness to connect*) dan “minat untuk membayar retribusi” (*willingness to pay*). Sosialisasi dan public campaing DSDP II mampu meningkatkan kesediaan masyarakat untuk melakukan Sambungan Rumah (SR) dengan alasan: i) masyarakat menyadari bahwa rembesan dari septic tank merupakan salah satu penyebab utama pencemaran air tanah terutama di daerah padat penduduk, dan ii) masalah lain dari septic tank adalah meluapnya air septic tank pada saat hujan lebat yang dapat menimbulkan bau busuk serta meningkatkan risiko sanitasi kepada masyarakat.

Gambar 2.9 Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Berjenjang”



5. Selain dibutuhkan adanya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, koordinasi dan kerja sama yang intensif antar Pemerintah Daerah (Propinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) juga sangat penting, mengingat letak lokasi pemasangan pipa air limbah DSDP ini berada pada wilayah kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal tersebut tidak saja berpengaruh pada saat masa konstruksi tetapi lebih utama lagi dalam hal pembentukan dan perkuatan lembaga pengelola seperti UPT-PAL Bali. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar lembaga Pemerintah Daerah tentunya akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan lembaga pengelola tersebut untuk mengoperasikan sistem DSDP dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa pembelajaran terkait koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a) Kontribusi Pemerintah Daerah:

- Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tanggung jawab Pemerintah Pusat terkait sewerage system meliputi IPAL dan jaringan pipa utama hingga tersier. Pada proyek ini, pembangunan jaringan utama hingga tersier menggunakan pinjaman JICA yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemasangan Sambungan Rumah (SR). Adanya kontribusi pembiayaan dari Pemerintah Daerah dalam hal pemasangan SR tersebut menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai kepemilikan (ownership) yang kuat atas proyek. Hal tersebut juga menjadi insentif bagi masyarakat karena selama pelaksanaan proyek, pembiayaan pemasangan SR digratiskan bagi masyarakat (dibiayai APBD). Biaya pemasangan SR sekitar Rp 6 juta/rumah. Terbatasnya APBD yang dimiliki Pemerintah Daerah menyebabkan alokasi untuk biaya pemasangan SR tidak lebih dari Rp 15 miliar/tahun. Dengan alokasi tersebut, pemasangan SR diperkirakan selesai pada tahun 2016.

b) Proses Pembentukan Kelembagaan:

- Pada awalnya dibentuk BLU-PAL (Badan Layanan Umum Pengelolaan Air Limbah) sebagai pengelola sewerage system yang telah dibangun melalui proyek DSDP I. Terdapat sharing untuk operasional dan pemeliharaan melalui pengelolaan oleh BLU-PAL yang ditanggung bersama oleh Pemprop Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung (wilayah Kuta dan Sanur).
- Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelembagaan pengelola tersebut harus berbentuk UPT (Unit Pelayanan Teknis) terlebih dahulu, dan pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab propinsi (peraturan perundangan tersebut terbit setelah pembentukan BLU-PAL). Sehingga BLU-PAL yang telah terbentuk diubah menjadi UPT Propinsi (di bawah Dinas Pekerjaan Umum) dengan pembiayaan dari Pemerintah Propinsi. Saat ini UPT Propinsi tersebut sedang dalam proses untuk menjadi BLU Daerah.
- Kebijakan kelembagaan pengelola limbah berbeda untuk setiap daerah. Sebagai contoh di Bali dikelola oleh Pemerintah Propinsi melalui UPT Propinsi, sedangkan di Kota Bandung Jawa Barat dikelola oleh PDAM yang meliputi air bersih dan air limbah.

c) Retribusi:

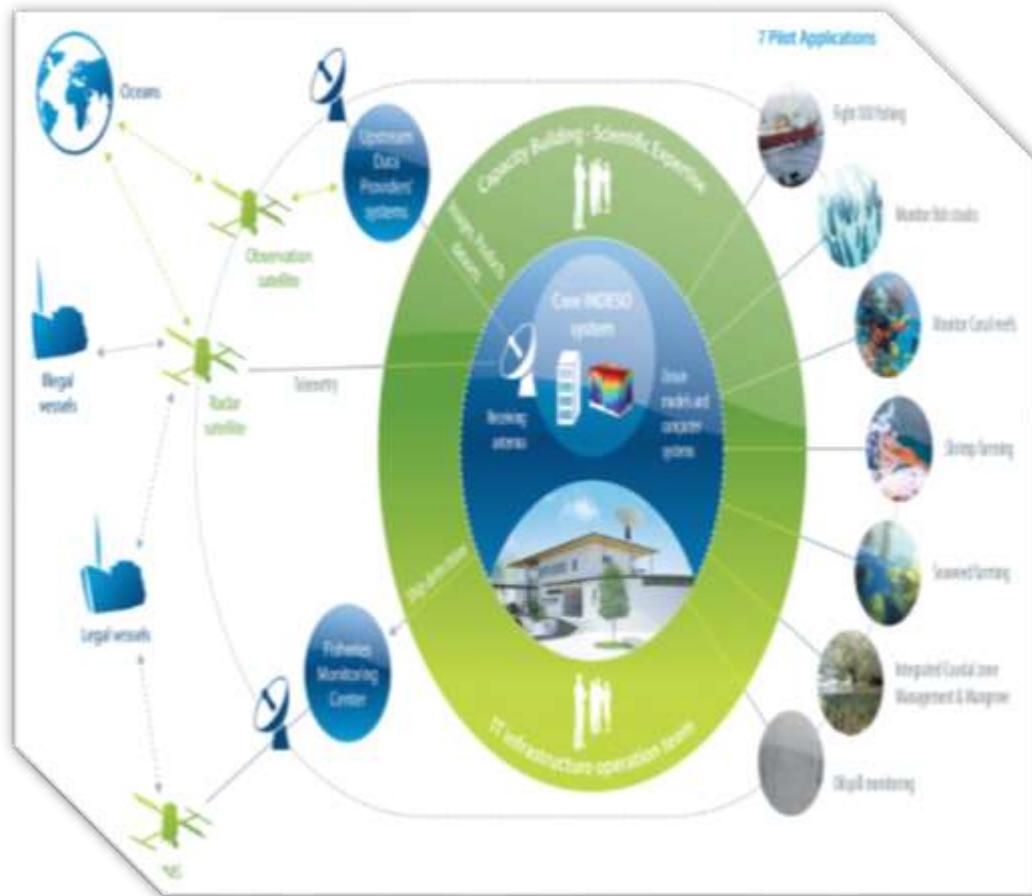
- Penentuan tarif dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Penentuan tarif di Bali menggunakan subsidi silang, yaitu untuk pelanggan non rumah tangga atau bisnis (hotel, restoran, dan lainnya) dikenakan tarif lebih mahal dibandingkan dengan pelanggan rumah tangga. Biaya retribusi dari pelanggan tersebut cukup untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sewerage system.
- Aspek kelembagaan juga berpengaruh terhadap enforcement pembayaran retribusi. Sebagai contoh, di kota Bandung - Jawa Barat, di bawah kelembagaan yang sama untuk pengelolaan air bersih dan air limbah, retribusi dilakukan dalam satu paket pembayaran yang sama. Dengan sistem ini, jika pelanggan tidak membayar retribusi, maka pelayanan untuk air bersih dapat dihentikan (aliran air bersih dapat diputus dalam jaringan). Saat ini, kelembagaan pengelolaan air bersih dan limbah di Bali dilakukan secara terpisah. Rencananya akan segera diintegrasikan dengan PT. PLN, sehingga pembayaran listrik dan retribusi bisa dilakukan dalam satu paket.

Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO)

Proyek Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) bertujuan untuk membangun infrastruktur oseanografi dan beberapa aplikasi pemantauan kelautan dan biota laut dalam rangka konservasi dan perlindungan ruang bawah laut. Proyek ini dibiayai dari Pinjaman Pemerintah Perancis melalui Badan Perancis untuk Pembangunan (Agence Francaise de Development atau AFD) senilai USD 30 juta, yang dimulai sejak 18 Juni 2012 dan akan berakhir pada 31 Desember 2016. Ruang lingkup pekerjaan dalam proyek ini meliputi *infrastructure development, input data procurement, support to operations, capacity building, downstreams applications, building, and management engineering*. Executing agency dari proyek ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Proyek INDESO memiliki 3 (tiga) segmen utama, yaitu: i) membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan pusat operasional untuk prediksi dan pemantauan; ii) mengimplementasikan rencana pengembangan kapasitas yang besar untuk transfer pengetahuan dan teknologi, dan iii) memperluas dan meningkatkan aplikasi downstream yang berorientasi pada hasil.

Gambar 2.10 Sistem Pengoperasian dan Pemantauan pada Proyek INDESO



Teknologi dan sistem operasional oseanografi berbasis teknologi satelit ini dibangun dengan mengintegrasikan sains dan teknologi terkini yang secara teratur menghasilkan data dan informasi kelautan secara harian, mingguan dan bulanan, bahkan musiman. Data-data ini didistribusikan secara langsung melalui laman www.indeso.web.id agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkannya secara mudah, kapan pun dan dimana pun secara gratis. Proyek ini memang mengacu pada pembentukan jaringan pengamatan oseanografi yang nyata, adaptasi pengembangan bentuk dan prediksi dalam sistem pengolahan maupun analisa, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan perikanan secara berkesinambungan oleh nelayan Indonesia. Infrastruktur INDESO diharapkan dapat memperkuat integrasi dan sinkronisasi data yang sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi lebih informatif, otomatis, *real time*, efektif dan efisien didalam

melakukan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, pemantauan, pengawasan dan penegakkan hukumnya di Indonesia.

Proyek INDESO saat ini telah menyelesaikan 3 (tiga) bangunan, yaitu bangunan pertama untuk menopang radar, bangunan kedua digunakan untuk ruang operasional yang dilengkapi dengan komputer, server dan software sebagai aplikasi pengolah citra penginderaan jarak jauh yang bisa mendeteksi *illegal fishing* dan *ocean modelling*, dan bangunan ketiga digunakan untuk ruang expo atau *theater room*.

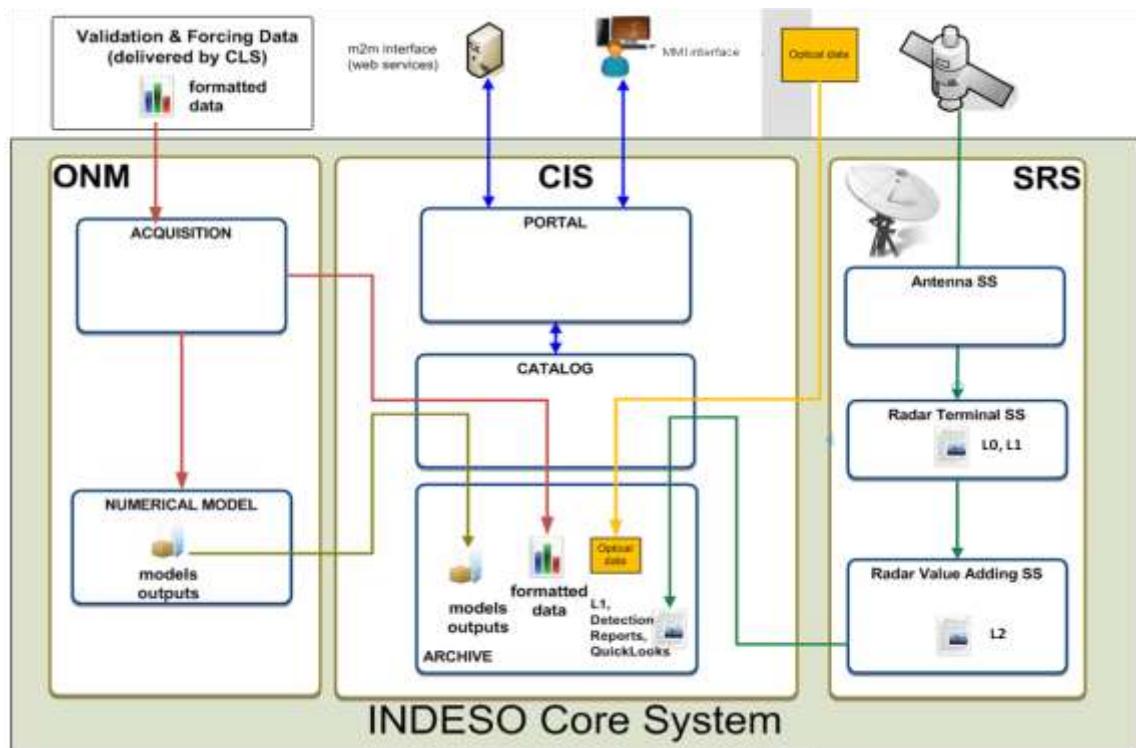
Gambar 2.11 Bangunan Penopang Radar, Ruang Operasional, dan Ruang Expo



Pada tahap operasional dan maintenance proyek, terdapat 3 (tiga) fasilitas yang menjadi perhatian utama dalam proyek INDESO, yaitu fasilitas Ocean Numerical Models (ONM), fasilitas Central Information System (CIS), dan fasilitas Satellite Receiving Station (SRS):

- *Ocean Numerical Models (ONM)*
ONM merupakan fasilitas untuk mengintegrasikan permodelan kondisi fisik lautan, permodelan komposisi biologis-kimiawi di laut, serta permodelan ekosistem laut yang dapat menentukan angka populasi ikan pada suatu lokasi tertentu beserta jenis ikannya. Data dari fasilitas ini didapatkan secara langsung dari radar satelit yang dipantulkan dan ditangkap oleh antena, serta dilanjutkan dengan melakukan observasi langsung pada lokasi yang ditunjukkan oleh hasil pantulan radar. Data ini dapat menghasilkan prediksi dan analisa secara berkala, biasanya dilakukan dengan skala per minggu. Salah satu tujuan dari fasilitas ini adalah mewujudkan pengelolaan persediaan ikan yang lebih baik. Capaian saat ini adalah sudah dilakukan distribusi data hasil model kepada para pemangku kepentingan.
- *Central Information System (CIS)*
CIS adalah fasilitas untuk menyimpan dan membuat katalog dari seluruh produk INDESO dan menyebarluaskannya melalui web-portal kepada masyarakat pengguna. CIS juga mendukung peningkatan jangkauan INDESO, dan mendistribusikan produk dengan resolusi optik yang sangat tinggi. Fasilitas ini berguna untuk aplikasi yang berhubungan dengan budidaya perairan dan pemantauan wilayah pesisir. Saat ini data CIS sudah digunakan untuk pengendalian risiko lingkungan seperti dalam kajian reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa, serta kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti dalam kajian mangrove di pesisir Batam.
- *Satellite Receiving Station (SRS)*
SRS merupakan fasilitas pengawasan yang memperoleh data langsung dari radar satelit. Saat ini terdapat 2 (dua) radar satelit yang dipakai, yaitu Radar SAT dari Kanada, dan COSMO-Sky Med yang merupakan satelit militer dari Italia. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengawasan selama 24 jam untuk segala cuaca, dan menghasilkan laporan deteksi yang mendekati waktu sebenarnya (maksimal waktu proses 30 menit setelah akuisisi data). Data dari SRS berguna untuk mendeteksi *illegal fishing* dan tumpahan minyak (*oil spill*). Data dari SRS sudah digunakan oleh beberapa institusi seperti PSDKP-KKP, SATGAS 115, dan BAKAMLA. Data juga dapat ditindaklanjuti oleh kapal pengawas secara langsung. Tim radar bekerja sama dengan PSDKP-KKP dan BAKAMLA dalam menyusun rencana operasi, sehingga diharapkan operasi laut jauh lebih efektif dan efisien.

Gambar 2.12 INDESO Core Architecture System



Beberapa pembelajaran yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek *Infrastructure Development of Space Oceanography* (INDESO) adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pengembangan perangkat lunak pengolah citra digital.
Proyek INDESO hanya akan berlangsung sampai dengan 2017, setelah itu pengelolaannya akan dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kemampuan pemograman perangkat lunak pengolah citra digital sangat dibutuhkan untuk pemutakhiran sistem informasi. Saat ini belum ada klausul dukungan pemutakhiran software dari penyedia aplikasi downstream pengolah citra digital. Untuk itu diharapkan staf yang memperoleh beasiswa S2 dan S3 di Perancis dapat mengembangkan software pengolah citra digital satelit saat ini. Selain itu, pegawai yang mengoperasikan software INDESO sebagian besar adalah pegawai kontrak, sehingga perlu segera dilakukan peningkatan kemampuan pegawai tetap yang ada untuk menggunakan downstream application.
2. Perbaikan struktur kelembagaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data.
Citra satelit dari RADAR SAT dapat digunakan oleh instansi pemerintah lainnya karena Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membeli lisensi satelit atas nama Pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan nilai guna dari aplikasi, maka diharapkan masyarakat maupun pihak swasta dapat memanfaatkan data yang tersedia, terutama untuk meningkatkan efisiensi dalam industri hasil laut di Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya rancangan kerangka kelembagaan yang memungkinkan adanya sharing data antar lembaga pemerintahan dan mekanisme penyediaan data kepada pihak swasta.
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh software INDESO bersifat A1 atau rahasia, sehingga dalam perencanaan operasi hingga pelaksanaan operasi harus menggunakan jalur komunikasi satu komando. Mengingat sangat terkait dengan data rahasia yang berhubungan dengan operasi laut, maka pengelolaan INDESO sebaiknya tidak berada dibawah Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

HIBAH LUAR NEGERI

❖ PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI

Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerja sama pembangunan bilateral, dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah, serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik (good governance).

Hibah yang dipantau dan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan ini masih terbatas pada hibah luar negeri. Dalam laporan Triwulan III Tahun 2016 ini terdapat 10 (sepuluh) proyek hibah yang dilaporkan kinerja pelaksanaannya. Proyek-proyek hibah tersebut dikelola oleh 4 (empat) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Hibah Reducing Disaster Risks Caused By Changing Climate In Nusa Tegara Timur and Nusa Tenggara Barat Provinces In Indonesia

Hibah dari FAO ini bertujuan mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hibah ini dilaksanakan oleh Badan Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian. Lokasi pelaksanaan hibah ini meliputi daerah Sikka, Sabu, Timor Tengah Selatan, Lembata, dan Alor di NTT, serta daerah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat di NTB. Hibah dimulai dari 1 Juni 2015 dan akan berakhir pada 31 Juli 2017.

Ruang lingkup hibah meliputi: i) meningkatkan produksi pertanian melalui peningkatan struktur dan kesuburan tanah dengan melibatkan partisipasi petani; dan ii) meningkatkan kemampuan petani untuk mengadopsi dan menggunakan secara berkelanjutan teknologi pertanian konservasi yang sesuai.

Untuk meningkatkan kinerja dari kelompok tani telah dilakukan training bagi petani melalui pengenalan kegiatan pertanian konservasi yang dinilai lebih efisien dari pertanian yang bersifat tradisional. Program pelatihan pertanian konservasi juga diadopsi oleh penyuluhan dan mitra pelaksana. Untuk mendukung kegiatan pelatihan pertanian konservasi, didirikan 3 (tiga) demo plot sebagai fasilitas pelatihan di Waigete (BPK Kabupaten Sikka), desa Depe di BPK Sabu Raijua, dan BPK Soe di Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Pelatihan Conservation Agriculture juga sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian bagi pemerintah propinsi, kabupaten, dan penyuluhan kecamatan melalui pendekatan *multi layer*.

Hibah Promoting Sago Starch Utilization In Indoenesia

Hibah yang dibiayai oleh FAO ini bertujuan mengenalkan pemanfaatan sagu di Indonesia. Hibah ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan. Pelaksanaan hibah dimulai sejak Januari 2016 dan akan berakhir pada Desember 2017.

Hibah ini memiliki ruang lingkup yang meliputi: i) meningkatkan kesadaran dan advokasi potensi sagu dan kontribusinya terhadap pertanian dan mata pencaharian masyarakat lokal, termasuk untuk diversifikasi dan ketahanan pangan; ii) sedikitnya 20 kelompok tani memperoleh keuntungan dari peningkatan pengetahuan teknis berbasis aplikasi penerapan Good Agriculture dalam produksi sagu; iii) sedikitnya 20 kelompok tani mendapatkan keuntungan dari peningkatan kapasitas yang dirancang untuk meningkatkan praktik manufaktur yang baik di ekstrasi pati sagu pada sedikitnya 4 pilot demonstrasi; iv) setidaknya 25 pengusaha mendapatkan keuntungan dari pelatihan teknis dan

agribisnis yang dirancang untuk mempromosikan pengembangan usaha pati sagu. Beberapa kemajuan yang sudah dicapai dari pelaksanaan hibah antara lain:

- 1) Project Inception telah diselenggarakan oleh FAO bekerja sama dengan Pusat Diversifikasi Pangan Badan Nasional Ketahanan Pangan untuk memperkenalkan proyek kepada para pemangku kepentingan dan membahas serta menyelesaikan rencana kerja.
- 2) Pedoman Teknis Sago Strach Production and Utilization termasuk produksi dan pemanfaatan sagu, pengolahan dan pemanfaatan limbah sagu telah dikembangkan dan disetujui oleh FAO.

Hibah Forest Programme

Hibah ini merupakan modul *Financial Cooperation (FC)* dari hibah *Forest and Climate Programme (Forclime)*. Hibah ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertujuan memberikan dukungan dan menemukan cara terbaik terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan REDD+ di 3 (tiga) kabupaten di Kalimantan (Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu).

Pelaksanaan hibah ini didasarkan pada *Financing Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia (Kemenkeu sebagai penerima hibah) dan KfW (Republik Federal Jerman sebagai donor) pada tanggal 19 November 2010. Pelaksanaan hibah ini dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan nilai hibah EUR 20 juta ditambah kontribusi Pemerintah Indonesia sebesar EUR 2 juta dalam bentuk *cash* dan *in kind*.

Ruang lingkup kegiatan hibah *Forest Programme* meliputi: i) peningkatan pengelolaan bentang lahan/lanskap hutan, ii) peningkatan kehidupan dan kesejahteraan melalui peluang pendapatan yang lebih bermanfaat dan berorientasi pada konservasi, iii) memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif dalam perancangan proyek, pelaksanaan, pengelolaan dan monitoring, iv) membantu klasifikasi hak-hak kepemilikan dan penggunaan lahan, v) REDD+ dan perhitungan karbon, vi) pembiayaan karbon dan distribusi pendapatan, yang mencakup pengaturan generasi untuk alokasi pendapatan dan kewajiban-kewajiban multi generasi.

Hibah Strengthening Forest Management Unit For Sustainable Forest Management and Community Empowerment

Hibah yang bertujuan penguatan unit pengelolaan hutan untuk pengelolaan kelanjutan hutan dan pemberdayaan masyarakat ini dibiayai oleh FAO. Hibah ini mulai dilaksanakan sejak April 2016 dan akan berakhir pada Maret 2017. Institusi pelaksana hibah ini adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lokasi proyek di Bantimurung dan Jeneberang Propinsi Sulawesi Selatan.

Ruang lingkup hibah ini meliputi: i) Pengembangan sumber daya manusia untuk 2 (dua) KPH di Sulawesi Selatan; ii) Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada 2 (dua) KPH; iii) Pelatihan lapangan untuk kelompok masyarakat di 2 (dua) KPH Percontohan; iv) Penyiapan rencana aksi manajemen yang efektif dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) KPH Produksi Jeneberang.

Sustainable Forest and Biodiversity Management in Borneo

Hibah yang dibiayai ADB ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa lingkungan Hutan Konservasi - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta membangun lokasi percontohan untuk pengembangan PES dan REDD+. Pelaksanaan hibah dimulai sejak September 2015 dan akan berakhir pada November 2017 dengan lingkup kegiatan, yaitu:

- 1) Penguatan kapasitas SDM dan institusi dalam pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan.
- 2) Penyelenggaraan REDD+ di tingkat sub nasional.
- 3) Lokasi percontohan untuk implementasi *Payment for Environmental Services (PES)* dan skema pembayaran pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berkelanjutan.

Dampak dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hutan di Indonesia akan diukur dengan indikator-indikator: (i) perluasan tutupan hutan, (ii) peningkatan proporsi kayu yang dihasilkan dari hutan tanaman lestari, dan (iii) pengurangan emisi karbondioksida. Sedangkan perbaikan manajemen akan tercermin dengan indikator-indikator: (i) tambahan satu juta hektar kawasan lindung yang ditetapkan; (ii) memperkuat kapasitas hutan lestari dan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan (iii) menyelesaikan rencana hutan lindung di empat kabupaten.

Hibah Minimum Service Standards – Capacity Development Program

Hibah *Minimum Service Standards – Capacity Development Program* merupakan hibah dari Uni Eropa yang diadministrasikan oleh ADB untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Indonesia. Daerah sasaran awal hibah ini terdiri dari 110 kabupaten/kota, namun pada akhirnya hanya 108 kabupaten/kota di 16 propinsi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan hibah. Masa pelaksanaan hibah ini mulai Juli 2013 dan akan berakhir pada Desember 2017.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan hibah ini meliputi: i) Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan; ii) Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Pendidikan; iii) Peningkatan pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.

Pada akhir pelaksanaan hibah ini diharapkan dapat tercapai 3 (tiga) output kegiatan yang direncanakan, yaitu:

- 1) Output 1 : meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
Sebanyak 108 kabupaten/kota telah mengembangkan proposal peningkatan kapasitas, pelatihan dan sosialisasi terkait SPM diikuti 116.177 partisipan dari berbagai pemangku kepentingan.
- 2) Output 2 : meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan.
Sosialisasi dan kampanye SPM sudah dilakukan ke berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
- 3) Output 3 : meningkatnya pengintegrasian SPM ke berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.
SPM telah digunakan di kabupaten/kota sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, sehingga transparansi meningkat. Beberapa kabupaten juga telah menerbitkan peraturan daerah mengenai SPM.

Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact

Hibah *Millenium Challenge Corporation (MCC)* yang disebut hibah *compact* adalah salah satu pilar utama kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia. Program *Compact* ini bertujuan membantu mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5 tahun (2013-2018).

Berbeda dengan pemberi hibah pada umumnya, MCC memberikan keleluasan dan wewenang bagi Indonesia untuk mengembangkan program yang digagas dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pelibatan banyak pemangku kepentingan ini, baik dari Kementerian/Lembaga, akademisi, dunia usaha hingga organisasi masyarakat madani (*Civil Society Organization/CSO*) merupakan hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program hibah dari mitra asing. Dengan demikian, program hibah bersaing dari MCC ini sejalan dengan prinsip *Jakarta Commitment*, yaitu Indonesia dan para mitra pembangunan bersama-sama memperkuat kepemilikan (*ownership*) negara penerima bantuan pembangunan. Dana dalam hibah MCC ini digunakan untuk membiayai 3 (tiga) proyek, yaitu:

- 1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*) yang bertujuan menyediakan fasilitas pendanaan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan berkarbon rendah dengan mengembangkan energi terbarukan sebagai penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan.
- 2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi *Stunting* yang bertujuan mengurangi dan mencegah berat lahir rendah dan pengerdilan juga kurang gizi masa kanak-kanak melalui kegiatan penambahan protein bagi ibu hamil dan balita. Terutama berupa pemberian *micronutrient*, bantuan teknis dan penyadaran perubahan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
- 3) Modernisasi Pengadaan yang bertujuan mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hibah Trade Corporation Facility

Hibah dari Uni Eropa ini bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama yang terkait dengan perdagangan dan investasi. Hibah ini mengupayakan terwujudnya penyusunan dan pengelolaan kebijakan yang lebih baik, sehingga diharapkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat, rasio investasi terhadap PDB meningkat, dan perdagangan luar negeri juga meningkat.

European Union – Indonesia Trade Cooperation Facility merupakan hibah terencana yang diusulkan oleh beberapa Kementerian/Lembaga yang terdiri dari: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kemenristekdikti-BPPT, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Hukum dan HAM, serta BKPM yang selanjutnya disebut sebagai *implementing agency*. Bertindak sebagai *executing agency* untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh *implementing agency* adalah Bappenas, dalam hal ini yaitu Direktorat Perdagangan, Investasi, dan KEI. Hibah ini mulai dilaksanakan sejak Juni 2012 dan berakhir pada November 2016, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Menilai dampak situasi global bagi struktur investasi dan perdagangan di Indonesia.
2. Membangun kerangka kerja analisis sebagai alat prediksi.
3. Membangun analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai formula bagi perdagangan dan investasi.
4. Mendesain prioritas bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada level nasional dan regional.
5. Mendesain alokasi anggaran yang efektif bagi pengembangan perdagangan dan investasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Peninjauan lokasi serta dialog dengan pembuat kebijakan.

Aligning Asian Development Bank and Country Systems for Improved Project Performance (ACSIP)

Hibah dari ADB ini dimulai sejak Juni 2014 dan akan berakhir pada Juni 2017, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi: i) Harmonisasi ADB's Safeguard Policy Statement dengan Safeguards System di Indonesia; ii) Harmonisasi prosedur pengadaan (*procurement system*) antara ADB dengan Indonesia; iii) penguatan persiapan proyek; dan iv) pembangunan kapasitas (*capacity building*).

Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja dari proyek hibah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Output 1 (komponen safeguard):
 - a) *Equivalence assessment* dan *workshop* hasil *assessment* terhadap *enviroment* dan *involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada tahun 2015.
 - b) *Acceptability assessment* terhadap *enviroment* and *involuntary resettlement* telah selesai dilakukan pada Juni 2016.
 - c) *Workshop* konsultansi temuan dan *action plan* untuk *equivalence* and *acceptability assessment* sudah dilakukan pada April dan Juni 2016.
 - d) Laporan reviu sistem *safeguard* Indonesia (*country safeguard review*) sudah disiapkan dan sedang dalam proses reviu oleh manajemen ADB. Laporan CSR dan feedback dari pemerintah dan stakeholders lain termasuk NGOs akan menjadi *board paper* yang dikirimkan ke ADB Board untuk penggunaan CSS.
- 2) Output 2 (komponen procurement):
Draf SBD ICB Construction Works (*Small Contract*) telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan masih menunggu persetujuan ADB Headquarter. Sedangkan draf SBD ICB untuk Kontrak Besar, Kontrak Rancang Bangun, Kontrak Barang, Kontrak Turnkey, dan seleksi konsultan (*RFP*) secara teknis sudah disampaikan dan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan stakeholders melalui *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan.
- 3) Output 3 (komponen penguatan kesiapan proyek (*project readiness criteria*)):
 - a) Draf laporan analisis *readiness criteria* sudah diperbaiki dan sedang dikomentari dari sisi ADB IRM. Rekomendasi yang dikeluarkan dari laporan tersebut mengusulkan 3 (tiga) kegiatan untuk masuk ke dalam output 4 (*capacity building*) guna meningkatkan kinerja proses tanpa mengubah kerangka regulasi yang ada.
 - b) Konsultan telah mengembangkan 3 (tiga) volume panduan dan *template* untuk 2 (dua) volume panduan.

Sustainable Infrastructure Assistance Program

Hibah Sustainable Infrastructure Assistance Program merupakan hibah dari Pemerintah Australia (DFAT) kepada Pemerintah Indonesia yang diadministrasikan melalui ADB. Hibah ini dilaksanakan sejak Agustus 2013 dan akan berakhir pada Juni 2019. Instansi pelaksana hibah adalah Direktorat Transportasi – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pengelolaan hibah ini dilakukan melalui steering committee yang beranggotakan Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Australia (DFAT), dan ADB.

Lingkup kegiatan dalam hibah ini terdiri dari Technical Assistance (TA) dan Capacity Building untuk infrastruktur yang terdiri dari pasokan air serta layanan infrastruktur kota lainnya (sanitasi, pengelolaan limbah, pengembangan transportasi, dan energi). Total TA yang berjalan adalah 9 (sembilan) TA, termasuk 3 (tiga) TA baru dan 4 (empat) sub TA yang sudah selesai dilaksanakan. Ketiga TA baru yang efektif di tahun 2016, yaitu:

- 1) TA 9116 INO: *Improving Multimodal Connectivity to Support Integrated Land and Sea Tollway*.
- 2) TA 9113 INO: *Strengthening Verification in Result-Based Programs in Indonesia's Power Sector*.
- 3) TA 9109 INO: *Strengthening Fiscal Risk Management of Accelerated Infrastructure Delivery*.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan hibah ini, ADB sudah melakukan reviu dan menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada anggota steering committee untuk dimintakan tanggapan.

Selain kesepuluh hibah tersebut diatas, dalam triwulan ini juga disampaikan laporan proyek-proyek hibah lainnya, meskipun pelaporannya belum menyertakan uraian tentang capaian kinerja proyek. Hibah luar negeri lainnya yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan III Tahun 2016 berjumlah 97 proyek, yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen USD 508,1 juta. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri tersebut sebagian besar diarahkan untuk mendukung penanganan lingkungan hidup dan perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pertanian, peningkatan infrastruktur dasar, pencegahan wabah penyakit, pemberdayaan masyarakat, dan juga peningkatan kapasitas (capacity building).

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu hibah terencana, hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan hibah langsung dalam bentuk uang.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (berdasarkan Bentuk dan Jenis)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah (Ekuivalen Juta USD)
HIBAH TERENCANA					
Kementerian Pertanian					
1	71113301	JICA	Proyek CF-SKR	2016	0,1
2	71113301	JICA	Proyek CF-SKR: Sustainable Horticulture Development in the Highland Area	2016	0,4
3	71113301	JICA	Proyek CF-SKR (3)	2016	0,9
4	71697101	IFAD	SOLID	05/07/2011 s/d 31/07/2019	5,0
Kementerian Pekerjaan Umum					
1	TF-094792	IBRD	Support for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project - PAMSIMAS	14/09/2009 s/d 30/09/2017	62,7
2	66387 INJ 149	AUSTRALIA	Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG)	01/07/2012 s/d 31/07/2017	30,5

(Ekuivalen Juta USD)

	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
3	TF 012192	IBRD	National Program for Community Empowerment Support Facility (PSF) Trust Fund	28/12/2012 s/d 15/12/2016	23,5
4	62031 INJ 149	AUSTRALIA	Water and Sanitation Program Phase 2	01/07/2012 s/d 31/07/2017	73,1
5	2020 60 796	KfW	Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management (Accompanying Measures)	02/05/2013 s/d 30/06/2018	8,5
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	0379-INO (EF)	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)	24/02/2014 s/d 30/06/2019	0,7
2	TF 015470	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI)	05/06/2014 s/d 30/06/2019	0,8
HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA					
Kementerian Kesehatan					
1	71229501	WHO	Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievement of Three Zeros (1)	01/01/2016 s/d 31/12/2017	35,6
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
1	23H15VSG	GIZ Jerman	Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI)	01/09/2014 s/d 30/09/2016	6,7
Komisi Pemberantasan Korupsi					
1	2007-GTZ	Jerman	Project Assistance in Preventing and Combating Corruption	21/09/2007 s/d 30/06/2017	6,7
2	71158801	USAID	Strengthening Integrity and Accountability Program I	30/09/2009 s/d 27/01/2016	5,1
Kementerian Pertanian					
1	27KXRJQA	EPSIS	Establishing National Agri-Food Information System and Developing Human Resources in Indonesia	April 2016 s/d November 2016	0,2
2	N/A	APSIS	Improving Statistics Data on Food Processing and Distribution Related to Agriculture Crops in ASEAN Region	14/07/2016 s/d 31/03/2017	0,1
3	N/A	JICA	Proyek CF-SKR the Improvement of Peanut and Sweet Potato's Production and Increasing in Farmers Income	2016	0,3
4	74886401	FAO	Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management Implementation and Pesticides Management System in Indonesia	01/01/2014 s/d 01/12/2015	0,4
5	71723301	JICA	Project on Capacity Development of Animal Health Laboratory	15/07/2011 s/d 14/06/2015	2,5
6	72436401	FAO	Enhancing the Capacity of the Government of Indonesia and Partner to Control Highly Pathogenic Avian Influenza	Januari 2012 s/d 01/12/2015	20,7

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
7	72228801	JICA	The Beef Cattle Development Project Utilization Local Resources in the Eastern Part of Indonesia	11/10/2016 s/d November 2011	4,7
8	71110201	Belanda	The Indonesia-Dutch Partnership Programme Pertaining to HPAI Prevention and Control	15/09/2006 s/d Desember 2011	10,0
9	71109501	ACIAR	Cost Effective Biosecurity for Non-Industrial Comercial Operation in Indonesia	01/06/2008 s/d 31/05/2012	0,2
10	70857101	FAO	Reinforcement and Exoansion of the AI Participatory Disease Surveillance and Response Program in Indonesia	Juni 2008 s/d Juni 2013	44,2
11	71108801	ACIAR	Improving Veterinary Service Delivery in a Decentralized Indonesia	29/01/2008 s/d 31/01/2012	0,5
12	72221901	FAO	Assistant through FAO for the Control of Rabies in Indonesia	27/01/2011 s/d Oktober 2013	0,5
13	29RLUFDA	New Zealand	Indonesia-New Zealand Dairy Excelence Activity	10/09/2015 s/d 2023	5,5
14	74527101	FAO	Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humance Control of Rabies in Indonesia with Special Emphasis on Flores and Lembata Island	September 2013 s/d Agustus 2016	0,7
15	74288801	GARC	Rabies Prevention and Eradication Program Nias	24/09/2013 s/d 30/09/2017	0,3
16	2FYUT388	Belanda	Food Security Programme in Livestock Components	25/07/2014 s/d 25/07/2017	0,0
17	74368801	DAFF	Australian Indonesia Improved Animal Welfare Program 2012-2015	24/06/2013 s/d 30/06/2015	0,0
18	23H1RKDA	OIE	Hibah Vaksin Rabies	12/04/2016	0,0
19	2RPU9TFA	FAO	Emergency Assistance to Rapidly Reduce the Increased Incidence of Rabies in Dogs and Reduce the Risk of Rabies in Human in Bali Indonesia	Maret 2009 s/d Februari 2017	0,3
20	2CFTEZHA	FAO	Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Treats Including Influenza A in Indonesia	01/01/2016 s/d 30/04/2019	16,0
21	2WYHAU15	UNDP	Sustainable Palm Oil Initiative	September 2014	15,5
22	71465701	AusAID	Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Health Program	18/01/2011 s/d 31/12/2016	22,0
23	75013301	New Zealand	Agricultural Quarantine Services Improvement (AQSI) Program	2014 s/d 30/06/2016	1,3
Kepolisian Republik Indonesia					
1	2WETU19A	Kedubes Jepang	OPSNAL	11/04/2016	0,1
2	2L7KR33A	WHO	Peralatan Pendukung Korlantas Polri	23/02/2016	0,1
Komisi Pemberantasan Korupsi					
1	22GF34VA	Jerman	Assistance in Preventing and Combating Corruption	01/07/2016 s/d 31/08/2016	2,2

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
2	71158801	USAID	Strengthening Integrity and Accountability Program 1	30/09/2009 s/d 31/08/2016	5,2
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	25XL516A	JICA	Project for Development of Internationally Standardized Microbial Resources Center to Promote Life Science Research and Biotechnology	31/03/2016 s/d 31/03/2016	1,2
2	2SVVX88A	Murata Manufacturing	Colaboration Research and Development of Inovative Energy Control Technology	31/03/2016 s/d 31/03/2016	0,1
3	2L32VPSA	Conservation International Foundation	Hibah Langsung Barang untuk Pusat Penelitian Oseanografi	24/02/2016 s/d 24/02/2016	0,0
4	N/A	The Plant Biotechnology Laboratory Eidgenossische Technische Hotchshule Zurich (ETHZ) Swiss	Implementing Novel Methods to Reduce Post Harvest Losses in The Cassava Value Chain in Indonesia	29/01/2016 s/d 31/07/2016	0,0
Kementerian Perindustrian					
1	2VWY68MA	UNDP	Reducing Release of Polybromodiphenyl Ethers (PDBE) and Unintentional Persistent Organic Pollutants (UPOPS) from Originating Unsound Waste Management and Recycling Practices and the Manufacturing of Plastic in Indonesia	08/03/2016 s/d 30/12/2019	4,0
HIBAH LANGSUNG UANG					
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional					
1	27KR7AMA	UNFPA	CP-9 UNFPA	29/03/2016 s/d Desember 2016	0,2
Badan Pengawas Obat dan Makanan					
1	72194001	WHO	Global Learning Opportunities for Vaccine Quality (GLO/QC) Clinical Data Evaluation (CDE) Course in Jakarta Indonesia	29/04/2016 s/d 18/04/2016	0,1
Badan Tenaga Nuklir Nasional					
1	2HCT1HE7	International Atomic Energy Agency	Hibah Langsung Bentuk Uang dari IAEA	30/03/2015 s/d 31/12/2016	0,0
2	74879501	International Atomic Energy Agency	Cordinater Research Project JO2003	08/12/2015 s/d 05/09/2016	0,0
Kementerian Kesehatan					
1	7091331	The GAVI Alliance	Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) – Civil Society Organization (CSO)	Juni 2009 s/d 31/12/2016	24,8
2	70913301	The GAVI Alliance	Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) – New Vaccine Support	02/01/2015 s/d 31/12/2016	13,3

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
3	71539501	UNICEF	Country Programme Action Plan 2016-2020	01/01/2016 s/d 31/12/2020	0,3
4	70920201	Bank Dunia	Third Water Supply and Sanitation for Low Income Community (Pamsimas II) Project	10/09/2009 s/d 30/09/2017	9,6
5	70725701	UNICEF	Programme Document (ProDoc)	01/01/2016 s/d 31/12/2020	0,2
6	2E6AZTKA	GF ATM Komponen AIDS	Indonesia HIV Response: Accelerating the Achievement of Three Zeros (2)	01/01/2016 s/d 31/12/2017	0,3
7	26XYN5DM	Jepang	Japan's Non Project Grant AIDS for Provision of Medical Equipment	20/11/2015 s/d 31/03/2017	5,4
8	2UDA77LA	The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria	A District-Focused Approach to Strengthening Indonesia's Health System (IDN-S-MOH)	01/07/2016 s/d 30/06/2018	8,0
9	71229501	WHO	Health System Information and Evidence	23/06/2016 s/d 28/11/16	0,0
10	74423301	IDRC	Improving Health Development and Services Monitoring to Address Health Inequities in Indonesia	02/01/2014 s/d 03/08/2016	0,4
11	27WRS1NB	WHO	APW of Assesment of JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) in Six Districts and Cities Selected by HDI	01/09/2014 s/d 31/01/2015	0,0
12	70980201	GF ATM KOMPONEN TB	Sample Registration System (Penguatan Analisa Kematiian untuk AIDS, TB dan Malaria menggunakan data SRS)	01/10/2015 s/d 30/06/2016	0,2
13	2H61BPFA	WHO	Services Availability and Readiness Assesment (SARA) Based Mapping in Support of MOH Supply Side Readiness Program Towards UHC	20/05/2016 s/d 30/09/2016	0,0
14	2BQSBMEA	UNFPA	Maternal Health, HIV SRH Linkages and MISP	01/08/2016	0,0
15	2JCADNZA	UNFPA	Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus 9 (2016-2020)	29/03/2016 s/d 31/12/2020	0,9
16	71229501	WHO	Implementation of MoH RI - WHO Collaborative Programmers	17/02/2012 s/d 31/12/2015	0,1
17	N.A	WHO	Implementation of MoH RI - WHO Collaborative Programmers (2)	N/A	0,0
18	N.A	UNICEF	Dana Bantuan (HIBAH) UNICEF	01/01/2016 s/d 31/12/2020	0,2
19	71097101	Global Fund ATM	Intensified Malaria Control Program in Kalimantan, Sulawesi, Sumatera and Six Provinces of Eastern Indonesia	01/01/2016 s/d 31/12/2017	17,3

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
20	71240201	Bloomberg UNION	UNION	01/03/2014 s/d 30/06/2016	0,3
Kementerian Pertanian					
1	71757101	IRRI	Multi-location Hybrid Rice Yield Trial	2010-2017	0,0
2	71878801	ACIAR	Improving Smallholder Cattle Fattening System Based on Forage Tree Legume Diets in Eastern Indonesia and Northern Australia	2010-2016	0,2
3	71878801	ACIAR	Increasing Productivity of Allium and Solanaceous Vegetable Crops in Indonesia and Sub-tropical Australia	01/04/2012 s/d 30/12/2016	0,1
4	74432601	WUR Belanda	Permanent Vegetables System (Cirebon)	2014-2016	0,1
5	2K5KVXJQ	ACIAR	Integrated Disease Management of Sugarcane Streak Mosaic in Indonesia	01/10/2014 s/d 31/12/2018	0,0
6	74683301	AVRDC	Vegetables go to School	01/01/2014 s/d 30/06/2016	0,2
7	23BK96AL	JAIF	Capacity Enhancement in Rice Production in Southwest Asia Under Organic Agriculture Farming System	April 2015 s/d April 2017	0,7
8	74433301	WUR Belanda	Increase in Potato in West Java (Pangalengan dan Garut)	2014-2016	0,2
9	2881RS8E	ACIAR	Integrating Herbaceous Forage Legumes Into Crop and Livestock Systems in East Nusa Tenggara, Indonesia	01/05/2014 s/d 30/04/2018	0,2
10	2W8R7VVG	ACIAR	Improving Soil and Water Management and Crop Productivity of Dryland Agriculture Systems of Aceh and NSW	01/05/2014 s/d 28/02/2018	0,1
11	2AH9JM5A	Research Council of Norway	Biochar as an Adaptation Strategy for Climate Change	01/09/2015 s/d 31/12/2017	0,1
12	2CXGC7SA	FAO	Building Policy Capacity Towards Sustainable Livestock Sector Development	Oktober 2014 s/d September 2016	0,1
13	2CDWXCUA	ICRAF	Development of Climate - Smart Agroforestry Models on Degraded Land in East Kalimantan and Central Java	14/12/2015 s/d 30/06/2017	0,1
14	2CFGND5A	Arcadia, Bisocience, inc	Limited Field Trial on Rice Nitrogen Use Efficiency (NUE) Under Rainfed Lowland Ecosystem in Indonesia	01/03/2013 s/d 30/09/2016	0,1
15	2KCWVV5A	FAO	Multi-country Construction of a Test Platform for the Development and Allocation of Globally Unique Identifiers for Rice Germplasm, Linking the MLS Information Infrastructure and the DivSeek	21/06/2016 s/d 21/06/2019	0,4

(Ekuivalen Juta USD)

No.	Kode Hibah	Donor	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Nilai Hibah
16	2E3ZD2QP	ACIAR	Improving Market Integration for High Value Fruit and Vegetable Production System in Indonesia	01/03/2014 s/d 28/02/2018	0,2
17	29Q1X59A	FAO	Co-Development and Transfer of Rice Technologies	21/06/2016 s/d 21/06/2019	0,4
18	2616V69L	NIAES	Development of Mitigation Option for Greenhouse Gas Emission from Agricultural Lands in Asia	2013-2017	0,1
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia					
1	74858801	USAID	Department of Foreign Affairs (RKA/KL)	08/01/2016 s/d 31/03/2020	1,9
2	2GV491MA	UNFGE	United Nations Subsidiary for Gender	03/11/2015 s/d 30/04/2016	0,0
3	72071901	NORAD	Government of the Kingdom	05/11/2011 s/d 31/12/2016	1,6
4	2VHRHNZA	United Nations Population Fund	Gender Equality and Women's Empowerment	29/03/2016 s/d 29/12/2017	0,2
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
1	75044001	WAITRO (Malaysia)	Basic Technology Adoption Training for Young Grass Root Leaders in Remote Areas: Biogas Power System in West Java Indonesia	12/03/2014 s/d 31/12/2015	0,0
2	2HB8U62A	German	Quality Assurance in Environmental and Food Analysis in Indonesia	09/06/2016 s/d 09/06/2019	0,1
Kementerian Perindustrian					
1	2MZQ395F	Korea Institute of Material Science (KIMS)	Development of Nd-Fe-B Magnet Having High Coercivity by Grain Boundary Diffusion Process (GBDP)	01/01/2014 s/d 31/12/2016	0,1
2	25AF3BDA	ACCF	Joint Research on Non-Wood Pulping Fiber Pulping for the ASEAN-China Wood Pulp Substitute Paper Industry	Juni 2015 s/d Juli 2017	0,2
TOTAL					508,1

DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2016 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	(Ekuivalen dalam Juta USD)		
									Target	TA 2016 Realisasi	%
			Badan Informasi Geospasial			63,1	61,9	1,2	0,0	0,0	0,0
1	IP-544	Jepang (JICA)	National Geo-Spatial Data Infrastructure Development Project	29/03/2007	26/07/2017	63,1	61,9	1,2	0,0	0,0	0,0
			Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan			57,8	30,4	27,4	19,5	10,2	52,4
			<i>Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan</i>								
2	2927-INO	ADB	Strengthening Accountability Revitalization Project (STAR)	19/02/2013	30/06/2018	57,8	30,4	27,4	19,5	10,2	52,4
			Badan Pengusahaan Batam			47,0	6,1	40,9	12,1	4,1	33,8
3	INA-20	Korea	Development of Sewerage System in Batam Island Project	29/12/2014	29/06/2019	47,0	6,1	40,9	12,1	4,1	33,8
			Badan Pusat Statistik			47,0	3,6	43,4	12,1	1,7	14,3
4	8038-ID	Bank Dunia	Statistical Capacity Building Change and Reform for the Development Statistic (Statcap-Cerdas)	18/07/2011	30/11/2018	47,0	3,7	43,3	12,1	1,7	14,3
			Kementerian Agama			128,4	3,1	125,3	13,7	2,9	21,5
			<i>Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam</i>								
5	IND-0158	IDB	The Development and Quality Improvement of State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Project *)	28/11/2011	30/09/2016	4,6	3,0	1,6	4,4	2,9	66,8
6	IND-0164	IDB	The Support to Development of Islamic Higher Education Project (4 in 1)	18/05/2013	10/11/2018	123,8	0,1	123,7	9,3	0,0	0,2
			Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi			518,1	282,1	236,0	129,9	38,9	30,0
			<i>Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>								
7	755-ID	IFAD	National Program for Community Empowerment in Rural Areas (IFAD Support to PNPM)	17/03/2009	31/03/2018	68,1	56,4	11,7	0,4	0,0	0,0

Keterangan :

*) Loan IND-0157 telah closing pada TW I 2016.

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
8	8217-ID	Bank Dunia	National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM Rural) 2012-2015	22/03/2013	31/12/2016	450,0	225,7	224,3	129,5	38,9	30,1
Kementerian Kelautan dan Perikanan											
<i>Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil</i>											
9	8336-ID	Bank Dunia	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	05/06/2014	30/06/2019	57,4	20,7	36,7	9,9	4,4	44,8
10	3094-INO	ADB	Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (Coremap-CTI)	24/02/2014	30/06/2019	45,5	11,2	34,4	9,7	2,1	21,6
10	880-ID	IFAD	Coastal Community Development Project (CCDP)	01/11/2012	01/11/2018	34,0	27,0	7,0	1,7	0,3	18,1
<i>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</i>											
11	CID 1025 01 C	Perancis (AFD)	Infrastructure Development Space Oceanography (INDESO)	18/06/2012	13/12/2016	30,0	24,4	5,6	5,6	0,0	0,0
Kementerian Ketenagakerjaan											
<i>Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas</i>											
12	IND-0159,0160	IDB	Support to Quality Improvement of The Vocational Training Centers (VTC) Project	23/12/2013	23/12/2017	32,5	0,1	32,4	27,5	0,1	0,3
Kementerian Komunikasi dan Informatika											
13	21686401	Perancis	Improvement on TV Transmitting Stations (ITTS) - Phase II	13/12/2013	15/12/2018	53,3	35,7	17,7	22,5	12,7	56,3
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat											
<i>Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika</i>											
14	IP-545	Jepang (JICA)	Aceh Reconstruction Project	29/03/2007	26/07/2017	114,8	76,7	38,1	9,1	8,6	94,3
15	21662601	RR Tiongkok	Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road	12/11/2012	28/08/2017	93,0	67,0	26,0	21,3	8,7	41,0
16	INA-17	Korea	Padang By-Pass Capacity Expansion Project	14/04/2011	14/08/2017	60,7	26,0	34,7	12,1	6,5	54,1

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
17	2817-INO	ADB	Regional Road Development Project (RRDP)	31/07/2012	31/07/2018	180,0	62,7	117,4	32,7	14,5	44,2
	IND-0161	IDB	Regional Road Development Project (RRDP)	29/04/2013	29/04/2017	65,0	9,6	55,4	11,5	2,8	24,5
18	IP-529	Jepang (JICA)	Tanjung Priok Acces Road Construction Project I	28/07/2005	30/12/2016	260,6	148,9	111,7	8,4	0,0	0,0
19	IP-531	Jepang (JICA)	Tanjung Priok Acces Road Construction Project II	01/04/2006	26/12/2016	263,7	205,2	58,5	16,8	7,6	45,4
20	21660201	RR Tiongkok	Tayan Bridge Construction	04/09/2012	08/05/2016	67,3	56,3	11,0	0,0	0,0	0,0
21	21663301	RR Tiongkok	Toll Road Development of Medan - Kualanamu	11/03/2013	11/03/2018	122,4	41,6	80,8	24,4	8,1	33,3
22	8043-ID	Bank Dunia	Western Indonesia National Roads Improvement (WINRIP)	12/03/2012	31/12/2017	250,0	64,9	185,1	58,0	26,0	44,9
Direktorat Jenderal Cipta Karya											
23	8259-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS II)	02/08/2013	31/12/2017	99,9	73,5	26,4	15,5	5,5	35,2
24	8578-ID	Bank Dunia	Additional Financing to the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS III)	22/08/2016	31/12/2020	300,0	0,0	300,0	24,3	0,0	0,0
25	IP-550	Jepang (JICA)	Denpasar Sewerage Development Project II	25/07/2008	25/07/2016	59,5	57,9	1,6	1,6	1,4	86,3
26	2010 66 471	Jerman (KfW)	Emission Reduction in Cities : Solid Waste Management	02/05/2013	30/06/2018	84,1	0,5	83,6	2,1	0,0	0,0
27	2654-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP)	22/11/2010	30/10/2016	35,0	21,0	14,0	9,5	0,3	3,5
28	IP-565	Jepang (JICA)	Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Sewerage System Development in DKI Jakarta	23/06/2014	23/06/2021	19,5	0,0	19,5	1,3	0,0	0,0
29	3123-INO	ADB	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	80,0	0,0	80,0	20,7	0,0	0,0
	8280-INO	AIF	Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP)	09/07/2014	31/12/2020	40,0	0,0	40,0	4,1	0,0	0,0
30	8213-ID	Bank Dunia	National Community Empowerment Program in Urban Areas (PNPM Urban) 2012-2015	01/03/2013	31/12/2016	266,0	230,6	35,4	35,3	13,3	37,6

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
31	3122-INO	ADB	Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2)	17/07/2014	30/06/2018	74,4	19,2	55,2	31,9	10,7	33,7
	IND-0169	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	187,0	152,0	35,0	25,7	16,7	64,9
32	IND-0170	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	8,0	4,5	3,5	1,8	2,0	114,3
	IND-0171	IDB	PNPM ICDD Phase III	15/12/2013	31/12/2017	10,0	6,3	3,7	1,6	2,0	124,2
33	IP-564	Jepang (JICA)	Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Areas Development (RISE II)	24/02/2014	23/06/2019	99,3	93,7	5,7	5,0	1,8	36,7
34	IND-0167	IDB	SANIMAS Community-Based Sanitation Project In Indonesia	29/10/2014	31/12/2018	100,0	15,9	84,1	19,5	11,0	56,3
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air											
35	21595701-31	RR Tiongkok	Additional Loan for Jatigede Dam	03/09/2013	09/01/2017	117,0	116,5	0,5	12,1	11,6	95,7
36	INA-19	Korea	Construction of Karian Multipurpose Dam Project	14/02/2012	22/03/2019	100,7	16,3	84,4	16,0	3,9	24,1
37	IP-552	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir I	28/07/2009	28/07/2018	60,0	38,4	21,6	5,8	2,6	45,3
38	IP-567	Jepang (JICA)	Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II	23/06/2014	23/06/2021	49,1	0,0	49,1	7,9	0,0	0,0
39	7669-ID	Bank Dunia	Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP)	08/06/2009	31/12/2016	50,0	42,3	7,7	4,2	0,5	10,6
40	IP-547	Jepang (JICA)	Decentralized Irrigation System Improvement Project	25/07/2008	25/07/2016	88,8	85,1	3,7	2,4	4,0	167,9
	2500-INO	ADB	Integrated Citarum Water Resources Management and Invesment Program (ICWRMIP)	03/06/2009	31/05/2016	20,0	17,2	2,8	4,6	5,2	114,3
41	2501-INO	ADB	Integrated Citarum Water Resources Management and Invesment Program (ICWRMIP)	03/06/2009	31/05/2016	30,9	24,6	6,3	4,0	2,8	70,8
42	IP-534	Jepang (JICA)	Integrated Water Resources & Flood Management	26/07/2006	26/07/2016	161,5	155,2	6,3	6,7	8,9	131,5
43	8121-ID	Bank Dunia	Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)	08/08/2012	31/03/2017	139,6	61,2	78,5	32,7	19,9	60,8

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
44	IP-522	Jepang (JICA)	Lower Solo River Improvement Project II	28/07/2005	27/01/2016	122,8	122,5	0,3	0,0	0,0	0,0
45	IP-523	JICA	Komering Irrigation Project Stage Phase II	28/07/2005	30/09/2017	92,6	79,2	13,4	2,9	2,2	75,9
46	IP-546	Jepang (JICA)	Participatory Irrigation System Improvement Project	25/07/2008	25/10/2017	121,9	116,0	6,0	7,1	5,2	73,1
47	IP-559	Jepang (JICA)	Upper Citarum Basin Flood Management	28/03/2013	25/07/2020	32,8	1,2	31,6	6,4	1,2	19,0
48	IP-551	Jepang (JICA)	Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	28/07/2009	28/07/2017	74,2	48,9	25,3	15,1	5,7	37,8
49	IP-566	Jepang (JICA)	Urgent Disaster Reduction Project for Mount Merapi and Lower Progo River Area - Phase II	24/02/2014	24/02/2018	50,6	12,5	38,2	14,3	8,2	57,5
50	8027-ID	Bank Dunia	Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP II)	14/11/2011	31/12/2018	150,0	74,9	75,1	57,9	6,9	11,8
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan						21,3	18,8	2,6	2,1	2,2	106,5
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah											
51	2007 66 071	Jerman (KfW)	Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training	15/12/2011	15/12/2016	21,3	18,8	2,6	2,1	2,2	106,5
Kementerian Perhubungan						658,1	168,1	490,0	120,3	26,2	21,8
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut											
52	IND-0133	IDB	The Development of Belawan Port Project Phase I	01/05/2010	05/04/2017	87,6	10,8	76,8	25,6	9,7	38,0
Direktorat Jenderal Perkeretaapian											
53	21671901	Perancis (NATIXIS)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	30/06/2018	89,7	0,0	89,7	1,5	0,0	0,0
	CID 1029 01G	Perancis (AFD)	Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line	04/06/2013	31/03/2018	51,7	0,0	51,7	1,0	0,0	0,0
54	IP-563	Jepang (JICA)	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement-Phase I	24/02/2014	20/02/2020	161,7	0,0	161,7	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
55	IP-508	Jepang (JICA)	Railway Electrification and Double Double Tracking Project I	13/12/2001	11/09/2016	231,0	132,5	98,5	91,4	16,2	17,7
56	2005 66 612	Jerman (KfW)	Track Maintenance Improvement Programme	22/12/2009	31/12/2016	36,5	24,8	11,7	0,6	0,2	37,5
Kementerian Pertanian						129,1	74,7	54,5	34,6	25,5	73,7
Badan Ketahanan Pangan											
57	835-ID	IFAD	Smallholder Livelihood of Development In Eastern Indonesia (SOLID)	06/07/2011	31/07/2019	49,1	40,6	8,5	18,8	16,1	85,7
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian											
58	8188-ID	Bank Dunia	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMART-D)	25/10/2012	30/06/2019	80,0	34,1	46,0	15,8	9,4	59,4
Kementerian PPN/Bappenas						182,7	106,0	76,7	33,2	27,2	81,7
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana											
59	IP-568	Jepang (JICA)	Profesional Human Resources Development IV	25/04/2014	25/04/2023	70,1	18,3	51,8	9,4	8,0	85,2
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas											
60	8010-ID	Bank Dunia	Scholarships Program for Strengthening Reforming Institution (SPIRIT)	16/06/2011	31/12/2017	112,7	87,7	24,9	23,9	19,2	80,3
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi						858,0	311,0	547,0	190,8	72,6	38,0
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi											
61	IP-553	Jepang (JICA)	Development of Bandung Institute of Technology III	28/07/2009	28/07/2018	56,1	30,6	25,4	9,2	4,7	51,6
62	IP-549	Jepang (JICA)	Development of World Class University at University of Indonesia	25/07/2008	15/07/2018	145,0	71,1	73,9	32,0	4,7	14,6
63	IP-541	Jepang (JICA)	Hasanuddin University Engineering Faculty Development	26/07/2007	25/07/2019	77,3	60,3	17,0	8,9	3,9	44,4
64	2928-INO	ADB	Polytechnic Education Development Project	07/02/2013	30/06/2018	75,0	28,6	46,4	28,4	12,4	43,7

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
	IND-0152	IDB	The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project	28/11/2011	31/12/2016	3,4	2,4	1,0	0,7	0,3	35,7
65	IND-0153	IDB	The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project	28/11/2011	31/12/2016	25,7	15,6	10,2	13,8	2,1	15,1
	IND-0154	IDB	The Development and Quality Improvement of Semarang State University (UNNES) Project	28/11/2011	31/05/2016	6,9	5,6	1,3	5,3	5,5	104,2
	IND-0137	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	31/12/2016	31,3	11,7	19,6	7,2	5,5	75,7
66	IND-0138	IDB	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	26/02/2011	31/12/2016	32,7	2,6	30,2	12,0	2,5	20,4
	SFD/8/526	Saudi Fund	The Development of Medical Education and Research Center and Two University Hospitals (3 in 1)	28/11/2010	01/01/2017	36,0	22,7	13,3	7,9	6,4	81,0
	IND-0140	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24/07/2011	31/10/2017	27,0	21,5	5,5	6,3	2,3	35,8
67	IND-0141	IDB	The Quality Improvement of Padjadjaran University Project	24/07/2011	31/05/2016	8,2	7,3	0,9	7,3	6,7	92,1
	IND-0155	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	31/12/2016	24,6	10,7	13,8	18,0	6,2	34,4
68	IND-0156	IDB	The Reconstruction and Upgrading of The State University of Padang (UNP) Project	28/11/2011	31/12/2016	4,9	0,1	4,9	3,5	0,0	0,0
	IND-0168	IDB	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	14/04/2014	14/04/2018	174,0	0,5	173,5	3,7	0,4	10,5
69	SFD/9/612	Saudi Fund	The Support to The Development of Higher Education Project (7 in 1)	15/09/2014	31/12/2018	35,0	0,0	35,0	0,2	0,0	0,0
Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi											
70	8245-ID	Bank Dunia	Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro)	12/06/2013	31/12/2020	95,0	19,8	75,2	26,5	9,1	34,4

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
Kepolisian Republik Indonesia								72,5	0,9	71,6	32,5
71	INA-21	Korea	Fast Patrol Boats for Indonesian National Police	21/03/2014	21/01/2018	33,8	0,4	33,4	15,2	0,2	1,4
72	INA-18	Korea	Integrated Trunking Radio Communication for Indonesian National Police	14/02/2012	22/11/2018	38,7	0,5	38,2	17,3	0,0	0,0
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia								16,5	11,4	5,1	5,6
73	LA 15.04.2011	Spanyol	Animal Husbandry Technology and Practices Improvement to Accelerate Meat and Milk Production	20/10/2011	20/12/2016	16,5	11,4	5,1	5,6	0,5	8,6
PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)								4,6	1,9	2,7	1,2
74	8192-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)	12/06/2013	31/03/2018	4,6	1,9	2,7	1,2	0,2	19,1
PT. PERTAMINA								567,1	202,7	364,4	209,1
75	8082-ID	Bank Dunia	Geothermal Clean Energy Investment Project	29/06/2012	31/12/2018	300,0	161,7	138,3	145,5	110,8	76,1
76	IP-557	Jepang (JICA)	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	25/10/2011	25/10/2019	267,1	41,0	226,1	63,5	17,1	26,8
PT. PLN								3.527,3	576,3	2.951,0	370,3
77	IP-532	Jepang (JICA)	Asahan Hydroelectric Power Plant III	15/05/2008	15/05/2017	273,8	10,4	263,4	12,6	0,0	0,0
78	IP-555	Jepang (JICA)	Engineering Services for Java-Sumatra Interconnection	31/03/2010	31/03/2019	38,5	14,0	24,5	5,0	0,0	0,0
79	7940-ID	Bank Dunia	Indonesia Power Transmission Development Project (PTD I)	30/05/2011	30/06/2018	205,0	100,2	104,8	44,2	12,1	27,4
80	IP-561	Jepang (JICA)	Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)	28/03/2013	28/03/2022	17,1	0,0	17,1	1,2	0,0	0,0
81	3083-INO	ADB	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	224,0	18,5	205,5	4,3	18,3	430,6
	8276-INO	AIF	Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission Crossing Project	29/09/2014	30/09/2019	25,0	0,0	25,0	0,4	0,0	0,0
82	IP-556	Jepang (JICA)	Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project	26/03/2013	30/04/2019	366,4	16,9	349,5	122,1	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
83	IP-539	Jepang (JICA)	North-West Sumatera Inter-Connector Transmission	26/01/2009	26/01/2017	159,7	93,4	66,3	5,2	5,0	96,6
84	EXIM PBC 330	RR Tiongkok	Pangkalan Susu Coal Fired Steam Power Plant	03/06/2015	03/06/2020	373,0	10,4	362,6	19,6	10,4	53,1
85	21661901	RR Tiongkok	Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project	26/03/2013	28/04/2017	132,2	51,3	80,9	17,8	6,9	38,4
86	IP-538	Jepang (JICA)	Peusangan Hydroelectric PP Construction Project	26/01/2009	26/01/2019	257,7	118,1	139,6	29,4	10,1	34,2
87	IP-537	Jepang (JICA)	PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities	26/01/2009	26/01/2018	44,6	2,8	41,7	0,0	0,0	0,0
	26180	Jerman (KfW)	Scattered Transmission & Substation Project (P. 3)	05/12/2014	30/09/2017	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0
88	CID 1039 01H	Perancis (AFD)	Scattered Transmission & Substation Project (P. 7)	25/07/2014	25/11/2016	20,0	1,1	18,9	14,9	1,1	7,2
	28221000	JBIC	Scattered Transmission & Substation Project (P. 8)	19/11/2012	30/06/2017	17,1	0,0	17,1	1,7	0,0	0,0
89	8280-ID	Bank Dunia	Scattered Transmission Line and Substation in Indonesia Phase II (IPTD II)	26/03/2014	31/12/2018	325,0	13,3	311,7	0,0	9,1	0,0
90	CID 1024 01B	Perancis (AFD)	Strengthening West Kalimantan Power Grid	08/02/2013	30/06/2018	49,5	38,9	10,6	7,7	5,1	66,3
	3015-INO	ADB	West Kalimantan Power Grid Strengthening Project	04/04/2014	30/06/2018	49,5	28,2	21,3	1,7	3,7	221,0
91	EXIM PBC 329	RR Tiongkok	Takalar Coal Fired Steam Power Plant	09/01/2015	29/04/2020	241,0	26,3	214,7	20,8	26,3	126,6
92	IP-560	Jepang (JICA)	Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)	28/03/2013	28/03/2022	50,6	1,4	49,1	12,5	0,1	0,6
93	8057-ID	Bank Dunia	Upper Cisokan Pumped Storage Hydro Electrical Power (1.040 MW)	01/05/2012	31/12/2018	640,0	31,2	608,8	49,2	1,2	2,5
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)								100,0	99,8	0,2	0,0
94	7731-ID	Bank Dunia	Indonesia Infrastructure Finance Facility (IIFF)	25/04/2011	30/11/2016	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	0,0

(Ekuivalen dalam Juta USD)

No.	Kode loan	Lender	Nama Proyek	Tanggal Efektif	Tanggal Tutup	Nilai Pinjaman	Penarikan s/d Triwulan III TA 2016	Pinjaman Belum Ditarik	TA 2016		
									Target	Realisasi	%
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta											
95	IP-554	Jepang (JICA)	Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project	28/07/2009	28/07/2019	476,9	369,2	107,7	222,8	75,8	34,0
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)											
Total						16.794,6	8.461,3	8.333,3	2.902,1	1.353,1	46,6

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS
Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat - 10310
Telp. (021) 3193 6207 FAX (021) 3145 374
www.bappenas.go.id